



Katalog BPS:4601001.33

**STATISTIK
POLITIK DAN KEAMANAN
PROVINSI JAWA TENGAH
2010**

<http://jateng.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

**STATISTIK
POLITIK DAN KEAMANAN
PROVINSI JAWA TENGAH
2010**

<http://jateng.bps.go.id>

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI JAWA TENGAH 2010

No. Publikasi : 33523.1107
Katalog BPS : 4601001.33
Ukuran Buku : 16 cm x 24 cm
Jumlah Halaman : 79 halaman

Naskah :

Seksi Statistik Ketahanan Sosial
Bidang Statistik Sosial
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Pengarah : R. Lukito Praptoprijoko, MA

Penganggung Jawab : Erisman, MSi

Editor : Ir. Sri Diastuti, MM

Penulis : 1. Herlina, S.ST
2. Rina Kartiningrum, S.S.T
3. Purwo Santoso

Tabulasi : 1. Herlina, S.ST
2. Rina Kartiningrum, S.S.T
3. Purwo Santoso

Gambar Kulit :

Seksi Statistik Ketahanan Sosial
Bidang Statistik Sosial
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 merupakan sajian hasil Survei Politik dan Keamanan tahun 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Data yang disajikan tentang keadaan politik dan keamanan di Jawa Tengah tahun 2010.

Data politik yang dicakup dalam publikasi ini meliputi data partisipasi penduduk dalam pemilihan umum, perolehan suara partai politik, jumlah anggota DPRD Provinsi menurut asal partai, pelaksanaan pilkada gubernur maupun bupati/walikota dan hasilnya. Sedangkan data keamanan meliputi indikator-indikator kriminalitas, jenis tindak kriminalitas, serta pelaku tindak kriminalitas. Dalam publikasi ini disajikan pula penjelasan mengenai lingkup data dan istilah teknis yang digunakan, sehingga pengguna data akan lebih memahami informasi yang disajikan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga publikasi ini dapat disajikan, disampaikan ucapan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Semarang, Desember 2011
BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala,

R. LUKITO PRAPTOPRIJOKO, MA
NIP. 195309211976031001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	2
Bab II METODOLOGI	
2.1 Sumber Data	3
2.2 Metode Pengumpulan Data	3
2.3 Konsep dan Definisi	3
Bab III KEGIATAN POLITIK	
3.1 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	8
3.2 Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	8
3.3 Pemilihan Umum Kepala Daerah	9
Bab IV KEJADIAN TINDAK PIDANA	11
4.1 Tingkat Kriminalitas	11
4.2 Jenis Tindak Kriminalitas yang Menonjol	14
4.3 Pelaku Tindak Pidana	15
Lampiran	17
Referensi	68

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Penduduk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010	18
Tabel 2	Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009	19
Tabel 3	Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah	20
Tabel 4	Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2009	21
Tabel 5	Jumlah Suara Sah, Suara Tidak sah dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2009 untuk Memilih Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota	22

Tabel 6	Perolehan Suara Sah Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemilu Legislatif 2009 menurut Kabupaten/Kota dan Partai Politik	23
Tabel 7	Perolehan Suara Sah Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Legislatif 2009 menurut Kabupaten/Kota dan Partai Politik	31
Tabel 8	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin, Hasil Pemilu Legislatif 2009	39
Tabel 9	Waktu Pelaksanaan Pilkada Terakhir Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	40
Tabel 10	Jumlah penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati/Walikota	41
Tabel 11	Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih Dalam Pilkada Gubernur Jawa Tengah menurut Kabupaten/ Kota	42
Tabel 12	Jumlah Suara Sah, Suara Tidak sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pilkada Bupati/Walikota	43
Tabel 13	Perolehan Suara Kepala Daerah dan Partai Pendukungnya	44

Tabel 14	Kepala Daerah Hasil Pilkada menurut Jenis Kelamin, Pendidikan dan Jabatan Sebelumnya	45
Tabel 15	Jumlah Kantor Polisi menurut Kabupaten/Kota dan Wilayah Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010	46
Tabel 16	Jumlah Polisi dan Rasio Penduduk per Polisimenurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010	47
Tabel 17	Nilai Beberapa Indikator Kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah menurut Jenis Indikator tahun 2008-2010	48
Tabel 18	Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (<i>crime total</i>) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010	49
Tabel 19	Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (<i>Crime Rate</i>) per 100.000 Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010	50
Tabel 20	Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (<i>Crime Clock</i>) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010	51
Tabel 21	Jumlah Pidana Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime cleared</i>) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010	52

Tabel 22	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (<i>Clearance Rate</i>) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2008-2010	53
Tabel 23	Jumlah Tindak Pidana Terhadap Fisik Manusia menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tindak Pidana di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010	54
Tabel 24	Jumlah tindak Pidana Terhadap Hak Milik (Barang) menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Tindak Pidana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010	55
Tabel 25	Jenis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010	57
Tabel 26	Jumlah Kasus 11 Jenis Tindak Pidana di Provinsi Jawa Tengah menurut Jam Kejadian Tahun 2010	58
Tabel 27	Sepuluh Jenis Tindak Pidana Terbesar di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010	59
Tabel 28	Tindak Kejahatan Menonjol (<i>Crime Index</i>) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2010	60
Tabel 29	Pelaku Tindak Kejahatan menurut Kabupaten/Kota, Klasifikasi Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010	61

Tabel 30	Pelaku Tindak Kejahatan menurut Kabupaten/Kota, Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010	62
Tabel 31	Warga Negara Indonesia (WNI) Pelaku Tindak Kejahatan menurut Kabupaten/Kota, Klasifikasi Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010	63
Tabel 32	Warga Negara Asing (WNA) Pelaku Tindak Kejahatan menurut Kabupaten/Kota, Klasifikasi Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010	64
Tabel 33	Kejadian Demonstrasi/Unjuk Rasa menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2010	65
Tabel 34	Banyaknya Hakim menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010	66
Tabel 35	Banyaknya Jaksa menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010	67

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam konteks sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya, manusia digolongkan sebagai makhluk sosial (*social animal*) yang secara alamiah harus hidup bersama dan berinteraksi dengan manusia lainnya (Soekanto, 1990; Roucek dan Warren, 1993; Badan Pusat Statistik, Publikasi Statistik Kriminal 2009). Sejalan dengan kodratnya tersebut, kebutuhan fundamental manusia tidak hanya terbatas pada kebutuhan biologis, tetapi juga mencakup kebutuhan sosial, seperti aktualisasi diri, kebebasan berkumpul dan berpendapat, dan rasa aman.

Era reformasi yang terjadi di Indonesia membawa perubahan yang sangat signifikan pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Perubahan sangat terasa dibandingkan dengan era sebelumnya. Kebekuan politik di era orde baru mencair pada era reformasi. Kebebasan berkumpul dan berpendapat dirasakan masyarakat lebih terjamin. Hal ini terlihat nyata dari maraknya berbagai demonstrasi dalam menyalurkan aspirasi dan pendapat. Mengungkapkan ketidaksetujuan ("menentang") kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah maupun institusi swasta (perusahaan), yang diwujudkan dalam bentuk demonstrasi massa merupakan bagian dari kegiatan politik masyarakat yang lebih marak dibandingkan dengan yang terjadi di era orde baru.

Perubahan pada sistem penyelenggaraan pemerintah daerah juga sangat dirasakan, terutama sejak diundangkannya perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) pada tanggal 18 Agustus 2000. Hal yang mendasar dengan diberlakukannya UUD 1945 tersebut adalah pelaksanaan pemilihan kepala pemerintahan daerah (Pilkada) dan legitimasi pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya. Sejak itu pula, beberapa daerah pemerintahan baru terbentuk, yang memisahkan dari provinsi, kabupaten/kota induknya.

Perkembangan bidang politik yang demikian cepat seringkali berimbas, baik langsung maupun tidak, terhadap tingkat stabilitas keamanan dalam

masyarakat. Demonstrasi yang dilakukan secara anarkis oleh para demonstran tentu saja akan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban. Selain itu, konflik massal terutama berupa perkelahian antar kelompok warga, sebagai akibat kurang pahamnya masyarakat menanggapi arti “kebebasan”, juga masih mewarnai kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang dapat membuat masyarakat yang kurang atau tidak memiliki rasa aman tidak akan mampu melakukan seluruh kegiatannya secara maksimal khususnya pada aspek ekonomi yang akhirnya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraannya.

Sejalan dengan itu, upaya untuk mewujudkan terciptanya situasi dan kondisi politik dan keamanan yang kondusif merupakan langkah strategis yang perlu terus menerus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil makmur.

1.2. Tujuan

Penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2010 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik politik dan kriminal secara berkala dan berkesinambungan yang dapat menggambarkan perkembangan politik dan keamanan. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

1.3. Ruang Lingkup

Publikasi ini menyajikan data tentang politik serta gambaran kejadian tindak kejahatan/kriminalitas yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah yang dirinci menurut Kabupaten/Kota.

BAB. II. METODOLOGI

2.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2010 ini bersumber dari Survei Statistik Politik dan Keamanan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Nara sumber Survei Politik dan Keamanan terdiri dari berbagai instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Instansi provinsi sebagai nara sumber terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Tengah, dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan instansi kabupaten/kota yang menjadi nara sumber terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten/Kota, Polres/Polresta di kabupaten/kota, Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota, Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2010 ini dikumpulkan melalui kompilasi data dari hasil registrasi/catatan instansi terkait secara berjenjang. BPS Kabupaten/Kota mengumpulkan data dari instansi terkait untuk kemudian dikirim ke BPS Provinsi Jawa Tengah. Pada tingkat provinsi, BPS Provinsi Jawa Tengah juga melakukan kompilasi data dari instansi yang menjadi nara sumber. Selanjutnya data yang sudah masuk dari kabupaten/kota serta data yang dikompilasi di tingkat provinsi diolah menjadi tabel-tabel yang disajikan dalam lampiran pada publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2010 ini.

2.3. Konsep dan Definisi

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini serta jenis sumber data yang menghasilkan data tersebut, konsep dan

definisi serta terminologi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini juga merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Undang-Undang nomor 32 tahun 2004).

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang nomor 32 tahun 2004).

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang nomor 32 tahun 2004).

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang nomor 32 tahun 2004).

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang nomor 22 tahun 2007).

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang nomor 22 tahun 2007).

Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri (Undang-Undang nomor 10 tahun 2008).

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (Undang-Undang nomor 10 tahun 2008).

Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin (Undang-Undang nomor 10 tahun 2008).

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (Undang-Undang nomor 10 tahun 2008).

Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu (Pasal 8, Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu), yaitu:

- 1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan,;
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan,;

- d. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - e. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - f. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c; dan
 - g. Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.
- 2) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.

Partisipasi Penduduk dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas.

Tindak Pidana Kejahatan/Kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Peristiwa yang dilaporkan adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Kepolisian atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh Kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Kepolisian RI jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah:

- ❖ Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.

- ❖ Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
- ❖ Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichtmatigheid*.
- ❖ Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
- ❖ Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- ❖ Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

Pelaku Tindak Kriminalitas adalah:

- ❖ Orang yang melakukan tindak kriminalitas.
- ❖ Orang yang turut melakukan tindak kriminalitas.
- ❖ Orang yang menyuruh melakukan tindak kriminalitas.
- ❖ Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan tindak kriminalitas.
- ❖ Orang yang membantu untuk melakukan tindak kriminalitas.

Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur:

- ❖ Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.
- ❖ Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih.
- ❖ Umum adalah anak-anak dan dewasa.

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan kurang dari 20 hari.

Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

Korban Kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

BAB III. POLITIK

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai kegiatan politik di Jawa Tengah. Informasi politik yang disajikan mencakup: pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, pemilu kepala daerah (pilkada).

3.1. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Undang-Undang Dasar juga menyatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

Calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR. Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jumlah suara sah dan suara tidak sah pada pemilu presiden dan wakil presiden di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah disajikan dalam lampiran pada tabel 2 dan tabel 3.

3.2. Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 24 Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 menyatakan bahwa daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan

kabupaten/kota. Sedangkan pasal 207 menyatakan bahwa daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan. Mengenai alokasi jumlah kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam pasal 23 dan pasal 26 Undang-undang tersebut. Jumlah suara sah dan tidak sah pada pemilu legislatif 2009 untuk memilih anggota DPRD Provinsi dari setiap kabupaten/kota dan anggota DPRD Kabupaten/Kota menurut partai politik peserta pemilu 2009 tersaji dalam lampiran pada tabel 4 sampai dengan tabel 8.

3.3. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu tahap pencapaian baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Melalui mekanisme tersebut paling tidak secara prosedural kedaulatan politik benar-benar berada di tangan rakyat. Melalui Pilkada secara langsung, rakyat menentukan sendiri para pemimpin eksekutif daerah tanpa keterlibatan dan intervensi DPRD. Format pilkada secara langsung didasarkan pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu) menyusul keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan judicial review sejumlah KPUD atas UU tersebut. Sebagai operasionalisasi dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan Perpu, pemerintah menertibkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6 tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005.

Berkaitan dengan pencalonan, berbagai regulasi tentang pilkada tersebut mengatur bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang perolehan kursi atau suaranya minimal 15 persen. Pada mulanya hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh suara/kursi minimal 15 persen di DPRD saja yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun kemudian dibuka juga bagi gabungan partai yang berada di luar parlemen lokal tersebut. Mengenai mekanisme pencalonan, ayat 1, 3, dan 5 Pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 secara berturut-turut mengatur bahwa:

- Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon;
- Partai politik atau gabungan partai politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon;
- Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam parpol atau gabungan parpol.

Aspirasi publik yang menginginkan adanya calon perseorangan atau “independen” kemudian dilegalisasi dengan keluarnya putusan mahkamah konstitusi yang membuka peluang untuk calon independen untuk turut maju ke kancah pemilihan kepala daerah secara langsung. Hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota ditampilkandalam lampiran pada tabel 9 sampai dengan tabel 14.

BAB IV. KEAMANAN

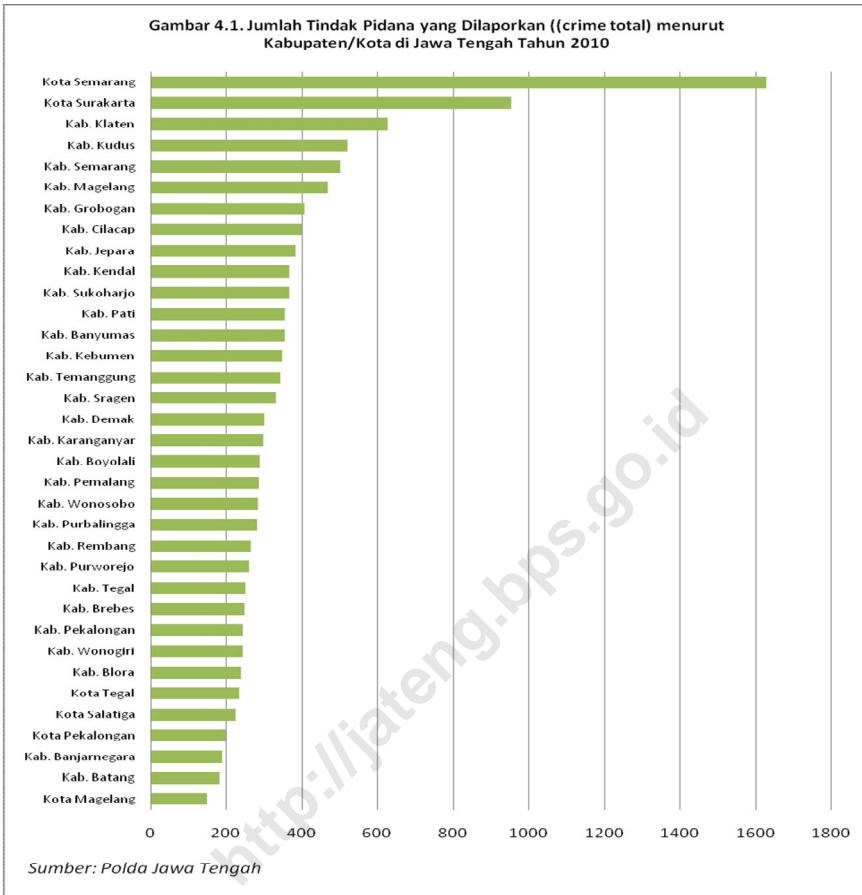
Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai kondisi keamanan di Jawa Tengah selama tahun 2010. Informasi keamanan yang disajikan mencakup: tingkat kriminalitas, jenis tindak kriminalitas yang menonjol, serta pelaku tindak kriminalitas.

4.1. Tingkat Kriminalitas

Selama periode tahun 2008 – 2010, jumlah kejadian tindak pidana atau tindak kriminalitas di Jawa Tengah meskipun berfluktuasi namun menunjukkan tren yang semakin menurun. Tabel 17 dalam lampiran menyajikan jumlah kejadian tindak kriminalitas atau *crime total* dari 16.630 kasus pada tahun 2008, mengalami peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2009, yaitu mencapai 31.016 kasus, namun pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 13.035 kasus.

Gambar 4.1 menyajikan jumlah kejadian tindak kriminalitas atau *crime total* selama tahun 2010, berkisar antara 150 – 1.629 kejadian. Dari Gambar 4.1 nampak bahwa lima kabupaten/kota yang paling rawan terhadap tindak kejahatan atau memiliki angka *crime total* paling tinggi selama tahun 2010 berturut-turut adalah Kota Semarang (1.629 kasus), Kota Surakarta (955 kasus), Kabupaten Klaten (627 kasus), Kabupaten Kudus (520 kasus) dan Kabupaten Semarang (501 kasus).

Sebaliknya lima kabupaten/kota yang paling aman terhadap tindak kejahatan atau memiliki angka *crime total* paling rendah selama tahun 2010 berturut-turut adalah Kota Magelang (150 kasus), Kabupaten Batang (182 kasus) dan Kabupaten Banjarnegara (192 kasus) Kota Pekalongan (200 kasus) dan Kota Salatiga (225 kasus).

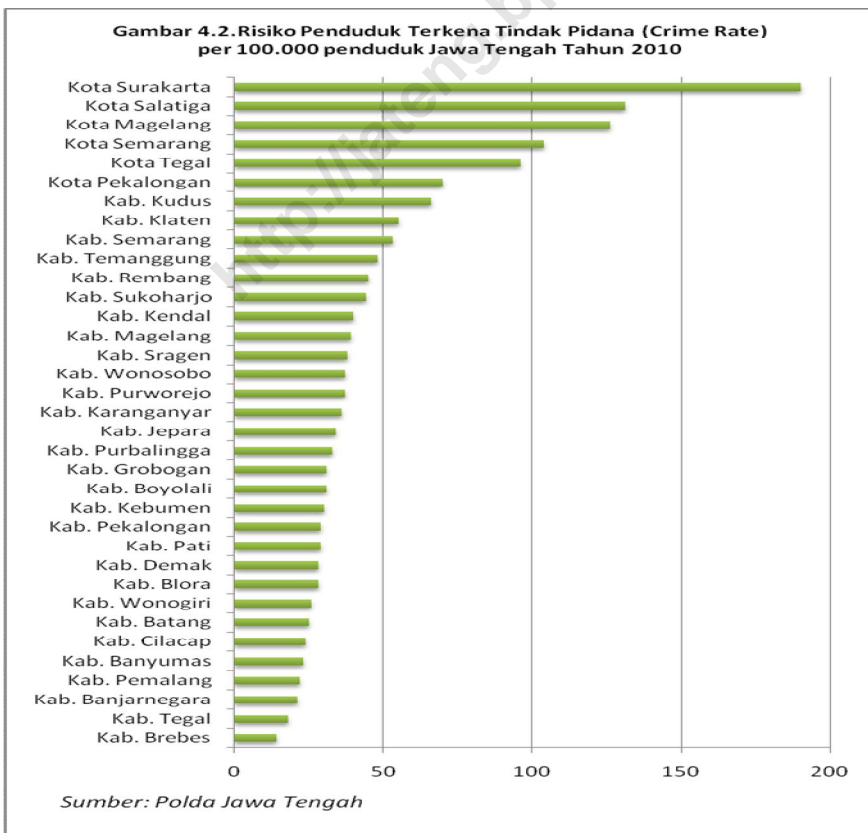


Seperti yang disajikan pada lampiran Tabel 19, angka *crime rate* di Jawa Tengah pada tahun 2010 mencapai 40 yang berarti bahwa dari setiap 100.000 orang penduduk di Jawa Tengah, sebanyak 40 orang mempunyai risiko terkena tindak kejahatan. Selama periode 2008 -2010, indikator *crime rate* ini juga menunjukkan pola perkembangan yang serupa dengan indikator *crime total*. Angka *crime rate* selama tahun 2010 lebih rendah bila dibandingkan dengan angka *crime rate* tahun 2009 yang mencapai sekitar 96. Penurunan angka *crime rate* pada tahun 2010 juga terjadi di kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Dari Gambar 4.2 juga terlihat bahwa angka *crime rate* untuk masing-masing kabupaten/kota selama tahun 2010 bervariasi dengan nilai berkisar antara

14-190. Selama tahun 2010, tiga kabupaten kota dengan angka *crime rate* tertinggi berturut-turut Kota Surakarta (190), Kota Salatiga (131) dan Kota Magelang (126). Sebaliknya, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Banjarnegara merupakan tiga kabupaten dengan angka *crime rate* terendah.

Salah satu aspek penting dari peristiwa tindak kriminalitas adalah intensitas kejadian tindak kriminalitas yang biasa diukur dengan menggunakan indikator *crime clock*. Indikator ini menunjukkan selang waktu atau interval waktu antara satu kejadian tindak kriminalitas dengan kejadian berikutnya, misalnya *crime clock* sebesar dua jam menunjukkan bahwa secara rata-rata setiap selang waktu dua jam terjadi satu tindak kriminalitas. Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah kejadian tindak kriminalitas, angka *crime clock* akan semakin rendah.



Seperti yang disajikan dalam lampiran Tabel 20, angka *crime clock* di Jawa Tengah pada tahun 2010 adalah 0.40'19" yang berarti bahwa setiap kurang dari satu menit di Jawa Tengah terjadi satu peristiwa tindak kriminalitas. Angka *crime clock* untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah bervariasi dengan nilai antara 0.07'55"-23.48'16". Tiga Kabupaten yang memiliki angka *crime clock* paling kecil atau paling sering mengalami kejadian tindak kriminalitas selama tahun 2010 berturut-turut adalah Kabupaten Batang (0.07'55"), Kabupaten Banyumas (0.36'24") dan Kabupaten Pati (0.36'24"). Sebaliknya, kabupaten dengan angka *crime clock* paling tinggi antara lain: Kabupaten Kendal dan Kabupaten Sukoharjo (23.48'16") serta Kabupaten Jepara (22.52'19").

4.2. Jenis Tindak Kriminalitas yang Menonjol

Tabel 23 pada lampiran menunjukkan bahwa selama tahun 2010, untuk kelompok tindak kriminalitas terhadap fisik manusia masih didominasi oleh tindak kriminalitas penganiayaan, baik penganiayaan yang tergolong ringan (475 kasus) maupun berat (288 kasus). Sedangkan jenis tindak kriminalitas yang paling dominan pada kelompok tindak kriminalitas terhadap hak milik (barang) selama tahun 2010 adalah tindak kriminalitas pencurian dengan pemberatan (2.387 kasus), kemudian pencurian kendaraan bermotor (1.548 kasus) dan tindak kriminalitas penipuan/perbuatan curang (1.295 kasus).

Kasus tindak kriminalitas penganiayaan ringan selama tahun 2010 paling banyak terjadi di Kota Semarang sebanyak 46 kasus, Kota Surakarta sebanyak 31 kasus dan Kabupaten brebes sebanyak 26 kasus. Sedangkan kasus tindak kriminalitas penganiayaan berat banyak terjadi di Kabupaten Kendal (29 kasus), Kabupaten Sragen (25 kasus) dan Kabupaten Pati (24 kasus).

Sementara itu, seperti yang disajikan pada Tabel 24, selama tahun 2010 Kota Semarang merupakan wilayah yang paling rawan terhadap tindak kriminalitas pencurian dengan pemberatan (203 kasus), kasus pencurian kendaraan bermotor (316 kasus) serta tindak kriminalitas penipuan/perbuatan curang (248 kasus). Sedangkan di Kota Surakarta,

tindak kriminalitas yang sering terjadi adalah tindak kriminalitas penipuan/perbuatan curang yang mencapai 187 kasus, tindak kriminalitas pencurian kendaraan bermotor sebanyak 155 kasus serta tindakan pencurian dengan pemberatan sebanyak 115 kasus.

Dari keseluruhan jenis tindak kriminalitas, Kepolisian Daerah Jawa Tengah secara khusus dan kontinyu memantau dan mengevaluasi perkembangan sebanyak 12 jenis tindak kriminalitas khusus yang dikategorikan sebagai tindak kriminalitas menonjol. Jenis tindak kriminalitas menonjol tersebut disajikan dalam lampiran pada Tabel 28, meliputi pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, penganiayaan berat, kebakaran, pembunuhan, perkosaan, kenakalan remaja, uang palsu, narkoba, perjudian, serta pemerasan dan pengancaman.

Tabel 28 dalam lampiran memperlihatkan bahwa selama periode tahun 2009-2010 secara nilai absolut, keseluruhan jenis tindak kriminalitas menonjol tersebut menunjukkan tren yang semakin menurun, yaitu dari 7.673 kasus pada tahun 2009 menjadi 6.095 kasus pada tahun 2010. Namun demikian proporsi jumlah seluruh kejadian tindak kriminalitas menonjol terhadap total jumlah tindak kriminalitas (*crime total*) selama periode tahun 2009-2010 mengalami peningkatan, yaitu dari 24,74 persen tahun 2009 menjadi 46,76 persen pada tahun 2010. Dari tabel tersebut menunjukkan pula bahwa pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, dan perjudian merupakan tiga jenis tindak kriminalitas menonjol yang paling dominan selama periode tahun 2009-2010.

4.3. Pelaku Tindak Kriminalitas

Data dari Polda Jawa Tengah mengungkapkan bahwa jumlah aksi tindak kriminalitas yang terjadi selama tahun 2010 dilakukan oleh sebanyak 12.426 orang pelaku. Dari keseluruhan pelaku kriminalitas selama tahun 2010, sebanyak 13.528 pelaku (99,79 persen) adalah warga negara Indonesia (WNI) dan sebanyak 28 pelaku lainnya (0,21 persen) adalah

warga negara asing (WNA). Aksi kejahatan yang dilakukan oleh WNA selama tahun 2010 terjadi di tujuh kabupaten/kota, yaitu Kota Surakarta (12 orang), Kota Semarang (9 orang), Kota Pekalongan (2 orang), Kabupaten Semarang (2 orang), Kabupaten Magelang (1 orang), Kabupaten Sragen (1 orang), dan Kota Salatiga (1 orang).

Pelaku tindak kriminalitas secara mayoritas adalah laki-laki, yaitu sekitar 99,01 persen dan sekitar 0,09 persen lainnya perempuan. Sekitar 99,68 persen pelaku kriminalitas adalah orang dewasa (berusia 16 tahun atau lebih) dan sekitar 0,32 persen lainnya adalah anak-anak (berusia kurang dari 16 tahun).

Sebaran jumlah pelaku tindak kriminalitas menurut kabupaten/kota selama tahun 2010 bervariasi antar kabupaten/kota. Tabel 29 dalam lampiran menunjukkan bahwa jumlah pelaku kriminalitas paling banyak selama tahun 2010 ditemukan di Kota Semarang (1.634 orang), Kota Surakarta (987 orang) dan Kabupaten Sukoharjo (670 orang). Sebaliknya jumlah pelaku kriminalitas yang paling sedikit ditemukan di Kota Magelang (154 orang), Kabupaten Batang (186 orang) dan Kabupaten Banjarnegara (195 orang).

LAMPIRAN

<http://litbang.bps.go.id>

**Tabel 1. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan
Penduduk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010**

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Ke-lurahan	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	2.138,51	24	284	1.642.107
2	Kab. Banyumas	1.327,59	27	331	1.554.527
3	Kab. Purbalingga	777,65	18	239	848.952
4	Kab. Banjarnegara	1.069,71	20	278	868.913
5	Kab. Kebumen	1.281,12	26	460	1.159.926
6	Kab. Purworejo	1.034,82	16	494	695.427
7	Kab. Wonosobo	948,68	15	265	754.883
8	Kab. Magelang	1.085,73	21	372	1.181.723
9	Kab. Boyolali	1.015,10	19	267	930.531
10	Kab. Klaten	655,56	26	401	1.130.047
11	Kab. Sukoharjo	466,66	12	167	824.238
12	Kab. Wonogiri	1.822,36	25	294	928.904
13	Kab. Karanganyar	773,79	17	177	813.196
14	Kab. Sragen	941,55	20	208	858.266
15	Kab. Grobogan	1.975,86	19	280	1.308.696
16	Kab. Blora	1.820,59	16	295	829.728
17	Kab. Rembang	1.014,08	14	294	591.359
18	Kab. Pati	1.503,68	21	406	1.190.993
19	Kab. Kudus	456,16	9	132	777.437
20	Kab. Jepara	1.004,13	16	194	1.097.280
21	Kab. Demak	897,43	14	249	1.055.579
22	Kab. Semarang	950,21	19	235	930.727
23	Kab. Temanggung	870,23	20	289	708.546
24	Kab. Kendal	1.002,23	20	286	900.313
25	Kab. Batang	788,64	15	248	706.764
26	Kab. Pekalongan	836,13	19	285	838.621
27	Kab. Pemasang	1.15,31	14	222	1.261.353
28	Kab. Tegal	878,79	18	287	1.394.839
29	Kab. Brebes	1.657,73	17	297	1.733.869
30	Kota Magelang	18,12	3	17	118.227
31	Kota Surakarta	44,04	5	51	499.337
32	Kota Salatiga	56,78	4	22	170.332
33	Kota Semarang	373,70	16	177	1.555.984
34	Kota Pekalongan	45,25	4	47	281.434
35	Kota Tegal	39,68	4	27	239.599
	Provinsi Jawa Tengah	32.687,59	573	8.577	32.382.657

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2. Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009

No	Kabupaten/Kota	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009	
		Terdaftar	Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab. Cilacap	1.391.399	958.076
2	Kab. Banyumas	1.262.347	927.776
3	Kab. Purbalingga	684.967	483.998
4	Kab. Banjarnegara	727.125	506.747
5	Kab. Kebumen	970.606	674.263
6	Kab. Purworejo	614.728	425.626
7	Kab. Wonosobo	611.130	465.888
8	Kab. Magelang	918.840	732.036
9	Kab. Boyolali	768.093	564.924
10	Kab. Klaten	1.008.862	721.206
11	Kab. Sukoharjo	661.650	473.742
12	Kab. Wonogiri	896.509	583.981
13	Kab. Karanganyar	667.454	487.054
14	Kab. Sragen	733.395	510.968
15	Kab. Grobogan	1.045.477	726.776
16	Kab. Blora	686.635	496.355
17	Kab. Rembang	464.342	350.319
18	Kab. Pati	1.006.452	689.230
19	Kab. Kudus	585.482	415.607
20	Kab. Jepara	813.802	573.816
21	Kab. Demak	795.653	557.023
22	Kab. Semarang	729.393	551.921
23	Kab. Temanggung	562.975	462.619
24	Kab. Kendal	734.999	539.643
25	Kab. Batang	555.314	419.158
26	Kab. Pekalongan	666.676	447.908
27	Kab. Pemasang	1.060.230	672.501
28	Kab. Tegal	1.153.764	728.419
29	Kab. Brebes	1.424.055	911.510
30	Kota Magelang	93.330	72.571
31	Kota Surakarta	398.446	302.805
32	Kota Salatiga	126.375	101.951
33	Kota Semarang	1.094.832	862.166
34	Kota Pekalongan	210.859	155.837
35	Kota Tegal	197.399	136.726
	Provinsi Jawa Tengah	26.323.595	18.691.146

Sumber: KPUD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 3. Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009		
		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	904.598	53.478	433.323
2	Kab. Banyumas	875.692	52.084	334.571
3	Kab. Purbalingga	448.944	35.054	200.969
4	Kab. Banjarnegara	469.302	37.445	220.378
5	Kab. Kebumen	626.897	47.366	296.343
6	Kab. Purworejo	400.266	25.360	189.102
7	Kab. Wonosobo	427.136	38.752	145.242
8	Kab. Magelang	679.430	52.606	186.804
9	Kab. Boyolali	524.673	40.251	203.169
10	Kab. Klaten	678.264	42.942	287.656
11	Kab. Sukoharjo	444.431	29.311	187.908
12	Kab. Wonogiri	550.246	33.735	312.528
13	Kab. Karanganyar	457.878	29.176	180.400
14	Kab. Sragen	473.381	37.587	222.427
15	Kab. Grobogan	682.699	44.077	318.701
16	Kab. Blora	458.292	38.063	190.280
17	Kab. Rembang	322.274	28.045	114.023
18	Kab. Pati	642.283	46.947	317.222
19	Kab. Kudus	394.675	20.932	169.875
20	Kab. Jepara	541.911	31.905	239.986
21	Kab. Demak	525.919	31.104	238.630
22	Kab. Semarang	515.158	36.763	177.472
23	Kab. Temanggung	427.278	35.341	100.356
24	Kab. Kendal	506.190	33.453	195.356
25	Kab. Batang	393.606	25.552	136.156
26	Kab. Pekalongan	416.892	31.016	218.768
27	Kab. Pemasang	621.983	50.518	387.729
28	Kab. Tegal	680.367	48.052	425.345
29	Kab. Brebes	849.608	61.902	512.545
30	Kota Magelang	68.135	4.436	20.759
31	Kota Surakarta	286.483	16.322	95.641
32	Kota Salatiga	96.810	5.141	24.424
33	Kota Semarang	824.419	37.747	232.666
34	Kota Pekalongan	145.695	10.142	55.022
35	Kota Tegal	128.614	8.112	60.673
Provinsi Jawa Tengah		17.490.429	1.200.717	7.632.449

Sumber: KPUD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 4. Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2009

No	Kabupaten/Kota	Pemilu Legislatif 2009	
		Terdaftar	Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab. Cilacap	1.373.704	940.895
2	Kab. Banyumas	1.271.777	894.165
3	Kab. Purbalingga	680.641	484.848
4	Kab. Banjarnegara	721.927	517.342
5	Kab. Kebumen	962.567	654.527
6	Kab. Purworejo	620.652	421.394
7	Kab. Wonosobo	603.549	461.151
8	Kab. Magelang	912.400	729.317
9	Kab. Boyolali	772.508	578.881
10	Kab. Klaten	1.013.986	729.438
11	Kab. Sukoharjo	651.182	459.772
12	Kab. Wonogiri	901.215	599.481
13	Kab. Karanganyar	666.337	499.734
14	Kab. Sragen	731.008	526.725
15	Kab. Grobogan	1.039.071	747.000
16	Kab. Blora	697.350	519.139
17	Kab. Rembang	462.753	382.975
18	Kab. Pati	1.003.299	727.029
19	Kab. Kudus	580.925	449.734
20	Kab. Jepara	808.800	579.490
21	Kab. Demak	787.246	571.998
22	Kab. Semarang	720.542	546.052
23	Kab. Temanggung	561.394	463.551
24	Kab. Kendal	727.107	533.537
25	Kab. Batang	558.991	421.532
26	Kab. Pekalongan	659.972	457.665
27	Kab. Pemasang	1.052.230	666.235
28	Kab. Tegal	1.142.163	709.215
29	Kab. Brebes	1.403.827	873.284
30	Kota Magelang	93.640	70.985
31	Kota Surakarta	392.494	281.798
32	Kota Salatiga	122.779	101.075
33	Kota Semarang	1.087.463	776.535
34	Kota Pekalongan	206.318	153.708
35	Kota Tegal	198.812	133.091
Provinsi Jawa Tengah		26.190.629	18.663.298

Sumber: KPUD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 5. Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah, Dan Tidak Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu Legislatif 2009 untuk Memilih Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Pemilu Legislatif 2009 pemilihan DPRD Provinsi		
		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	837.760	103.135	432.809
2	Kab. Banyumas	761.564	132.601	377.612
3	Kab. Purbalingga	372.538	112.310	195.793
4	Kab. Banjarnegara	425.824	91.518	204.585
5	Kab. Kebumen	550.596	103.931	308.040
6	Kab. Purworejo	362.301	59.093	199.258
7	Kab. Wonosobo	361.731	99.420	142.398
8	Kab. Magelang	615.348	113.969	183.083
9	Kab. Boyolali	461.969	116.912	193.627
10	Kab. Klaten	593.710	135.728	284.548
11	Kab. Sukoharjo	370.750	89.022	191.410
12	Kab. Wonogiri	532.029	67.452	301.734
13	Kab. Karanganyar	397.344	102.390	166.603
14	Kab. Sragen	393.122	133.603	204.283
15	Kab. Grobogan	599.112	147.888	292.071
16	Kab. Blora	404.464	114.675	178.211
17	Kab. Rembang	255.057	127.918	79.778
18	Kab. Pati	531.510	195.519	276.270
19	Kab. Kudus	306.868	142.866	131.191
20	Kab. Jepara	465.716	113.774	229.310
21	Kab. Demak	410.461	161.537	215.248
22	Kab. Semarang	444.134	101.918	174.490
23	Kab. Temanggung	379.171	84.380	97.843
24	Kab. Kendal	412.160	121.377	193.570
25	Kab. Batang	320.443	101.089	137.459
26	Kab. Pekalongan	336.471	121.194	202.307
27	Kab. Pemasang	528.376	137.859	385.995
28	Kab. Tegal	548.280	160.935	432.948
29	Kab. Brebes	713.299	159.985	530.543
30	Kota Magelang	57.935	13.050	22.655
31	Kota Surakarta	244.005	37.793	110.696
32	Kota Salatiga	77.441	23.634	21.704
33	Kota Semarang	671.159	105.376	310.928
34	Kota Pekalongan	113.164	40.544	52.610
35	Kota Tegal	106.248	26.843	65.721
Provinsi Jawa Tengah		14.962.060	3.701.238	7.527.331

Sumber: KPUD Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 6. Perolehan Suara Sah Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu Legislatif 2009 menurut Kabupaten/Kota dan Partai Politik

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik				
		Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	22.272	19.021	5.738	10.993	46.938
2	Kab. Banyumas	18.093	13.365	5.192	11.335	41.948
3	Kab. Purbalingga	6.550	4.730	2.101	3.599	12.659
4	Kab. Banjarnegara	10.221	5.595	3.005	3.294	17.646
5	Kab. Kebumen	9.143	10.823	3.836	6.765	26.581
6	Kab. Purworejo	6.206	4.796	3.416	7.523	17.873
7	Kab. Wonosobo	13.196	4.401	2.439	4.019	17.699
8	Kab. Magelang	21.800	6.478	3.751	6.506	35.188
9	Kab. Boyolali	16.373	7.956	2.198	5.426	19.031
10	Kab. Klaten	17.306	7.940	2.526	4.357	31.906
11	Kab. Sukoharjo	8.682	3.773	1.635	2.968	13.996
12	Kab. Wonogiri	8.958	8.119	3.001	5.474	21.589
13	Kab. Karanganyar	11.830	11.913	2.936	3.621	17.080
14	Kab. Sragen	9.532	7.710	2.092	8.387	14.164
15	Kab. Grobogan	23.809	14.974	7.601	5.785	41.020
16	Kab. Blora	19.491	6.680	3.430	4.912	23.682
17	Kab. Rembang	6.705	4.955	1.132	1.788	12.613
18	Kab. Pati	12.870	13.979	3.641	3.413	61.307
19	Kab. Kudus	11.388	11.358	3.689	1.965	17.223
20	Kab. Jepara	22.790	10.568	2.480	3.795	49.122
21	Kab. Demak	12.625	10.914	3.033	4.509	23.668
22	Kab. Semarang	17.680	7.633	2.619	3.897	26.003
23	Kab. Temanggung	16.358	5.535	2.453	3.359	19.522
24	Kab. Kendal	20.401	8.133	2.774	3.333	17.989
25	Kab. Batang	18.725	7.014	2.282	4.456	18.104
26	Kab. Pekalongan	11.056	7.279	1.888	3.516	12.265
27	Kab. Pemasang	16.165	8.470	3.498	6.620	26.350
28	Kab. Tegal	14.850	10.164	4.237	7.040	22.967
29	Kab. Brebes	22.864	14.618	6.271	10.859	30.845
30	Kota Magelang	935	207	138	443	2.330
31	Kota Surakarta	7.465	1.062	599	991	9.451
32	Kota Salatiga	2.934	816	299	731	4.089
33	Kota Semarang	17.364	5.151	2.651	3.125	40.499
34	Kota Pekalongan	2.697	656	284	597	3.837
35	Kota Tegal	3.584	1.387	589	1.417	3.775
Provinsi Jawa Tengah		462.918	268.173	99.454	160.818	800.959

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 6. (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik				
		Partai Barisan Nasional (BARNAS)	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Amanat Nasional (PAN)	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kab. Cilacap	4.727	2.841	45.034	59.806	0
2	Kab. Banyumas	3.406	2.517	45.739	63.608	0
3	Kab. Purbalingga	2.409	2.153	29.071	32.018	0
4	Kab. Banjarnegara	2.793	2.841	32.734	58.395	0
5	Kab. Kebumen	5.602	4.693	32.953	32.817	0
6	Kab. Purworejo	1.524	1.236	21.447	13.171	0
7	Kab. Wonosobo	2.269	1.984	13.748	29.913	0
8	Kab. Magelang	1.903	1.723	44.608	50.835	0
9	Kab. Boyolali	2.576	1.886	39.515	56.449	0
10	Kab. Klaten	3.410	2.679	63.366	62.738	0
11	Kab. Sukoharjo	1.286	2.377	42.111	30.123	0
12	Kab. Wonogiri	3.918	2.026	50.903	30.780	0
13	Kab. Karanganyar	2.628	6.088	44.231	25.733	0
14	Kab. Sragen	2.744	1.315	40.754	19.093	0
15	Kab. Grobogan	3.122	4.824	25.227	17.821	1.221
16	Kab. Blora	2.119	5.331	18.890	11.193	7.176
17	Kab. Rembang	1.273	547	11.949	8.418	92
18	Kab. Pati	6.967	3.307	31.882	10.257	511
19	Kab. Kudus	3.471	584	21.197	27.170	1.322
20	Kab. Jepara	7.669	2.932	22.119	21.681	298
21	Kab. Demak	7.805	2.411	31.978	14.546	573
22	Kab. Semarang	3.151	8.700	39.878	22.606	0
23	Kab. Temanggung	1.439	2.549	22.468	32.855	0
24	Kab. Kendal	1.731	1.985	26.192	27.756	0
25	Kab. Batang	3.134	812	12.157	21.232	0
26	Kab. Pekalongan	3.045	1.070	12.780	33.862	0
27	Kab. Pemalang	4.608	2.684	36.431	38.074	0
28	Kab. Tegal	2.255	3.000	46.619	31.278	0
29	Kab. Brebes	5.904	4.133	44.690	50.330	0
30	Kota Magelang	382	648	5.055	4.011	0
31	Kota Surakarta	677	1.152	25.993	13.174	0
32	Kota Salatiga	359	2.784	9.336	3.218	0
33	Kota Semarang	3.863	5.181	68.163	24.715	0
34	Kota Pekalongan	279	251	7.016	18.144	0
35	Kota Tegal	1.247	454	9.144	6.449	0
Provinsi Jawa Tengah		105.695	91.698	1.075.378	1.004.269	11.193

Sumber: KPUD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 6. (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik				
		Partai Keadaulatan (PK)	Partai Persatuan Daerah (PPD)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Pemuda Indonesia (PPI)	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Kab. Cilacap	2.439	1.254	32.114	0	1.531
2	Kab. Banyumas	3.017	846	52.624	0	1.453
3	Kab. Purbalingga	508	496	24.217	0	569
4	Kab. Banjarnegara	711	809	28.700	0	704
5	Kab. Kebumen	1.004	845	28.598	0	705
6	Kab. Purworejo	480	914	32.043	1.847	549
7	Kab. Wonosobo	421	636	58.168	664	414
8	Kab. Magelang	809	1.036	73.003	709	485
9	Kab. Boyolali	1.578	795	18.468	828	1.081
10	Kab. Klaten	1.818	944	13.168	617	1.924
11	Kab. Sukoharjo	1.308	1.558	11.400	604	867
12	Kab. Wonogiri	765	687	4.739	1.005	1.940
13	Kab. Karanganyar	1.799	2.651	11.747	1.276	844
14	Kab. Sragen	1.004	517	19.293	995	847
15	Kab. Grobogan	1.066	1.011	61.307	1.489	1.657
16	Kab. Blora	2.163	3.110	26.870	1.560	1.872
17	Kab. Rembang	140	1.281	25.435	295	525
18	Kab. Pati	579	3.914	25.319	5.320	1.146
19	Kab. Kudus	1.802	645	29.879	747	1.341
20	Kab. Jepara	1.403	2.431	25.864	1.544	1.980
21	Kab. Demak	1.317	613	47.461	1.291	792
22	Kab. Semarang	1.032	681	23.545	727	824
23	Kab. Temanggung	598	1.531	46.781	531	411
24	Kab. Kendal	659	1.060	60.825	863	661
25	Kab. Batang	479	555	28.652	456	742
26	Kab. Pekalongan	786	481	79.285	368	399
27	Kab. Pemasang	1.559	1.411	49.614	934	1.588
28	Kab. Tegal	834	617	95.284	0	1.226
29	Kab. Brebes	837	788	91.894	0	2.634
30	Kota Magelang	56	60	2.664	52	70
31	Kota Surakarta	437	419	2.155	540	450
32	Kota Salatiga	136	103	2.776	85	211
33	Kota Semarang	2.572	2.164	19.497	1.715	1.321
34	Kota Pekalongan	51	78	11.860	146	100
35	Kota Tegal	185	87	9.416	0	164
Provinsi Jawa Tengah		36.352	37.028	1.174.665	27.208	34.027

Sumber: KPUD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 6. (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik				
		Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)	Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan)	Partai Matahari Bangsa (PMB)	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Kab. Cilacap	4.664	475	3.735	0	1.044
2	Kab. Banyumas	4.551	1.047	3.217	0	3.724
3	Kab. Purbalingga	7.496	363	3.870	0	566
4	Kab. Banjarnegara	11.000	329	1.800	0	2.122
5	Kab. Kebumen	5.933	685	1.026	0	852
6	Kab. Purworejo	4.081	233	321	0	614
7	Kab. Wonosobo	5.433	199	1.188	0	360
8	Kab. Magelang	3.628	329	1.142	0	798
9	Kab. Boyolali	1.797	253	1.537	0	673
10	Kab. Klaten	2.419	255	18.072	0	1.454
11	Kab. Sukoharjo	3.179	172	1.820	0	475
12	Kab. Wonogiri	4.175	253	517	0	1.169
13	Kab. Karanganyar	3.618	346	1.826	0	866
14	Kab. Sragen	4.507	260	994	0	2.139
15	Kab. Grobogan	19.102	1.277	531	0	3.076
16	Kab. Blora	3.808	743	395	0	3.684
17	Kab. Rembang	1.266	89	133	0	455
18	Kab. Pati	13.219	816	1.061	0	3.466
19	Kab. Kudus	1.980	985	567	0	4.075
20	Kab. Jepara	1.085	2.956	554	0	834
21	Kab. Demak	8.255	522	272	0	1.284
22	Kab. Semarang	2.525	220	3.224	0	703
23	Kab. Temanggung	1.598	268	466	0	338
24	Kab. Kendal	3.264	1.322	1.169	0	1.972
25	Kab. Batang	3.677	507	626	0	481
26	Kab. Pekalongan	2.248	522	1.600	0	3.218
27	Kab. Pemasang	6.102	311	3.058	0	1.053
28	Kab. Tegal	5.683	191	4.186	0	669
29	Kab. Brebes	6.287	424	4.134	0	5.122
30	Kota Magelang	442	394	201	0	308
31	Kota Surakarta	1.641	163	1.073	0	654
32	Kota Salatiga	663	28	137	0	134
33	Kota Semarang	9.066	605	2.635	0	1.840
34	Kota Pekalongan	693	184	311	0	395
35	Kota Tegal	1.255	92	3.169	0	101
Provinsi Jawa Tengah		160.340	17.518	70.567	0	50.718

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 6. (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik				
		Partai Republika Nusantara (RepublikaN)	Partai Pelopor	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Partai Damai Sejahtera (PDS)
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
1	Kab. Cilacap	3.545	763	119.414	40.681	1.248
2	Kab. Banyumas	4.445	585	77.936	28.423	1.121
3	Kab. Purbalingga	3.748	397	50.507	19.103	0
4	Kab. Banjarnegara	1.561	1.485	45.862	59.371	0
5	Kab. Kebumen	1.392	589	57.227	37.094	0
6	Kab. Purworejo	3.121	2.106	59.455	15.899	1.373
7	Kab. Wonosobo	1.026	335	41.141	29.749	1.307
8	Kab. Magelang	2.356	485	38.944	62.908	1.237
9	Kab. Boyolali	1.182	1.865	73.218	9.159	1.286
10	Kab. Klaten	2.011	1.227	71.465	17.276	2.991
11	Kab. Sukoharjo	1.329	406	36.487	10.906	5.027
12	Kab. Wonogiri	1.497	861	84.800	7.210	1.383
13	Kab. Karanganyar	9.128	11.008	62.681	6.628	3.273
14	Kab. Sragen	973	1.879	44.091	7.712	1.524
15	Kab. Grobogan	1.759	3.061	88.266	30.528	2.502
16	Kab. Blora	1.260	5.288	74.609	24.938	1.404
17	Kab. Rembang	663	3.818	37.716	38.444	365
18	Kab. Pati	2.967	11.557	46.487	17.056	2.160
19	Kab. Kudus	873	2.286	31.862	17.920	2.524
20	Kab. Jepara	1.625	553	52.690	77.924	6.343
21	Kab. Demak	4.319	742	41.755	38.170	1.422
22	Kab. Semarang	1.973	499	57.829	42.182	3.214
23	Kab. Temanggung	988	1.302	42.109	35.863	1.916
24	Kab. Kendal	1.062	519	51.410	30.057	1.024
25	Kab. Batang	878	2.359	24.112	25.336	589
26	Kab. Pekalongan	867	306	27.086	20.495	336
27	Kab. Pemasang	2.388	773	74.819	60.558	1.151
28	Kab. Tegal	1.073	965	39.967	26.865	896
29	Kab. Brebes	1.696	938	67.424	45.002	1.140
30	Kota Magelang	236	31	5.734	1.262	1.565
31	Kota Surakarta	824	491	15.820	4.169	12.618
32	Kota Salatiga	243	90	8.101	2.960	3.751
33	Kota Semarang	2.006	1.360	43.562	20.032	17.206
34	Kota Pekalongan	192	69	21.515	15.363	424
35	Kota Tegal	288	498	11.155	2.418	749
Provinsi Jawa Tengah		65.494	61.496	1.727.256	929.661	85.069

Sumber: KPUD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 6. (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik				
		Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)	Partai Bulan Bintang (PBB)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Partai Bintang Reformasi (PBR)	Partai Patriot (PP)
(1)	(2)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
1	Kab. Cilacap	3.990	6.656	241.169	1.654	0
2	Kab. Banyumas	1.035	4.105	215.697	1.300	0
3	Kab. Purbalingga	189	1.663	101.584	1.812	0
4	Kab. Banjarnegara	419	4.221	69.445	2.624	0
5	Kab. Kebumen	901	4.121	151.265	2.004	0
6	Kab. Purworejo	389	9.654	66.214	944	2.490
7	Kab. Wonosobo	287	3.193	68.010	1.067	396
8	Kab. Magelang	285	4.176	116.621	2.764	426
9	Kab. Boyolali	341	7.269	126.350	915	338
10	Kab. Klaten	3.116	4.804	162.187	1.381	345
11	Kab. Sukoharjo	260	6.946	123.668	714	710
12	Kab. Wonogiri	449	2.774	220.388	1.169	289
13	Kab. Karanganyar	381	5.793	81.576	845	1.852
14	Kab. Sragen	1.350	4.899	131.734	866	239
15	Kab. Grobogan	15.878	5.275	110.738	2.445	0
16	Kab. Blora	2.849	7.789	72.396	3.393	0
17	Kab. Rembang	193	8.302	25.482	829	0
18	Kab. Pati	1.002	17.405	125.618	1.199	0
19	Kab. Kudus	268	3.192	47.138	3.502	235
20	Kab. Jepara	655	2.716	70.102	867	1.300
21	Kab. Demak	2.146	3.152	52.961	2.447	279
22	Kab. Semarang	294	1.999	89.313	2.939	0
23	Kab. Temanggung	298	1.736	60.887	990	514
24	Kab. Kendal	332	1.533	59.875	1.080	0
25	Kab. Batang	211	1.118	95.436	1.246	0
26	Kab. Pekalongan	200	3.185	72.064	500	0
27	Kab. Pemasang	579	2.142	111.082	967	0
28	Kab. Tegal	562	4.079	128.704	3.034	0
29	Kab. Brebes	844	3.036	175.138	1.144	0
30	Kota Magelang	42	168	11.466	191	193
31	Kota Surakarta	267	2.287	87.195	547	316
32	Kota Salatiga	43	209	12.500	134	0
33	Kota Semarang	1.246	6.780	113.760	1.181	0
34	Kota Pekalongan	55	936	13.152	110	0
35	Kota Tegal	73	544	27.391	114	0
Provinsi Jawa Tengah		41.429	147.857	3.438.306	48.918	9.922

Sumber: KPUD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 6. (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik				
		Partai Demokrat (PD)	Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)	Partai Indonesia Sejahtera (PIS)	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)	Partai Merdeka
(1)	(2)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
1	Kab. Cilacap	136.715	894	1.273	13.379	343
2	Kab. Banyumas	136.651	1.630	704	10.922	383
3	Kab. Purbalingga	54.883	381	586	4.310	0
4	Kab. Banjarnegara	49.819	426	288	7.604	0
5	Kab. Kebumen	97.031	626	415	25.070	0
6	Kab. Purworejo	75.618	439	346	5.104	162
7	Kab. Wonosobo	44.073	288	368	12.404	172
8	Kab. Magelang	94.912	851	560	31.984	251
9	Kab. Boyolali	53.856	529	3.711	2.633	294
10	Kab. Klaten	84.172	776	952	3.351	252
11	Kab. Sukoharjo	53.891	510	222	660	170
12	Kab. Wonogiri	58.318	358	1.210	565	182
13	Kab. Karanganyar	58.245	487	2.748	7.31	194
14	Kab. Sragen	53.020	245	2.230	5.374	200
15	Kab. Grobogan	89.747	524	844	10.171	476
16	Kab. Blora	59.246	394	351	2.800	243
17	Kab. Rembang	53.053	205	656	5.910	96
18	Kab. Pati	90.497	1.035	484	9.016	447
19	Kab. Kudus	46.296	156	1.168	7.175	128
20	Kab. Jepara	54.342	318	792	11.855	270
21	Kab. Demak	74.946	317	471	11.747	624
22	Kab. Semarang	67.689	879	452	7.668	325
23	Kab. Temanggung	54.891	313	549	16.474	150
24	Kab. Kendal	72.720	429	394	8.310	270
25	Kab. Batang	40.690	171	819	2.374	104
26	Kab. Pekalongan	22.953	127	381	11.254	436
27	Kab. Pemasang	51.072	346	504	12.018	615
28	Kab. Tegal	74.821	327	0	12.055	283
29	Kab. Brebes	102.699	535	0	10.205	441
30	Kota Magelang	17.593	111	98	723	23
31	Kota Surakarta	47.386	2.242	421	561	214
32	Kota Salatiga	17.965	265	1.533	553	36
33	Kota Semarang	235.857	4.229	1.169	5.823	777
34	Kota Pekalongan	10.292	65	147	3.076	31
35	Kota Tegal	19.661	51	0	668	38
Provinsi Jawa Tengah		2.355.620	21.479	26.846	274.527	8.630

Sumber: KPUD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 6. (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik			Total Suara Sah
		Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI)	PARTAI Sarikat Indonesia	Partai Buruh	
(1)	(2)	(38)	(39)	(40)	(41)
1	Kab. Cilacap	0	0	1.410	837.760
2	Kab. Banyumas	0	0	945	761.564
3	Kab. Purbalingga	0	0	0	372.538
4	Kab. Banjarnegara	0	0	0	425.824
5	Kab. Kebumen	0	0	0	550.596
6	Kab. Purworejo	348	0	365	362.301
7	Kab. Wonosobo	421	0	343	361.731
8	Kab. Magelang	770	0	1.087	615.348
9	Kab. Boyolali	0	0	603	461.969
10	Kab. Klaten	0	0	505	593.710
11	Kab. Sukoharjo	0	0	510	370.750
12	Kab. Wonogiri	0	0	558	532.029
13	Kab. Karanganyar	0	0	741	397.344
14	Kab. Sragen	0	0	439	393.122
15	Kab. Grobogan	603	0	375	599.112
16	Kab. Blora	175	0	220	404.464
17	Kab. Rembang	112	0	122	255.057
18	Kab. Pati	1.147	0	459	531.510
19	Kab. Kudus	511	0	246	306.868
20	Kab. Jepara	829	0	430	465.716
21	Kab. Demak	680	0	414	410.461
22	Kab. Semarang	352	213	666	444.134
23	Kab. Temanggung	398	0	733	379.171
24	Kab. Kendal	399	184	473	412.160
25	Kab. Batang	245	0	964	320.443
26	Kab. Pekalongan	361	0	252	336.471
27	Kab. Pemasang	461	0	371	528.376
28	Kab. Tegal	0	0	3.549	548.280
29	Kab. Brebes	0	0	423	713.299
30	Kota Magelang	27	0	76	57.935
31	Kota Surakarta	0	0	551	244.005
32	Kota Salatiga	60	29	130	77.441
33	Kota Semarang	1.382	770	1.892	671.159
34	Kota Pekalongan	73	0	85	113.164
35	Kota Tegal	0	0	85	106.248
Provinsi Jawa Tengah		9.354	1.196	20.022	14.962.060

Sumber: KPUD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 7. Perolehan Suara Sah Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Legislatif 2009 menurut Kabupaten/Kota dan Partai Politik

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik				
		Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	23.722	24.043	0	12.220	40.684
2	Kab. Banyumas	23.754	12.029	912	12.317	35.935
3	Kab. Purbalingga	8.086	3.115	0	4.643	10.770
4	Kab. Banjarnegara	9.143	2.576	0	4.547	16.369
5	Kab. Kebumen	9.194	15.206	12	7.657	24.056
6	Kab. Purworejo	5.915	4.202	0	7.514	17.470
7	Kab. Wonosobo	15.923	3.212	0	4.010	15.925
8	Kab. Magelang	15.544	4.090	0	8.790	43.790
9	Kab. Boyolali	23.805	13.293	0	6.141	14.190
10	Kab. Klaten	29.732	9.120	0	4.498	22.530
11	Kab. Sukoharjo	11.497	0	0	2.200	7.797
12	Kab. Wonogiri	13.486	7.272	0	5.073	17.509
13	Kab. Karanganyar	11.322	19.910	0	4.542	11.991
14	Kab. Sragen	11.255	6.657	0	16.026	11.280
15	Kab. Grobogan	31.579	12.242	3.041	5.139	39.390
16	Kab. Blora	26.088	0	0	6.187	15.395
17	Kab. Rembang	7.294	5.700	0	4.262	9.017
18	Kab. Pati	21.179	18.565	0	3.940	27.790
19	Kab. Kudus	13.557	15.033	6.383	3.359	16.139
20	Kab. Jepara	24.818	12.341	0	4.230	53.125
21	Kab. Demak	16.306	13.908	0	5.955	21.341
22	Kab. Semarang	25.999	4.642	1.627	6.185	28.279
23	Kab. Temanggung	23.920	2.061	0	3.559	19.005
24	Kab. Kendal	25.647	7.591	482	3.737	17.290
25	Kab. Batang	22.968	10.689	0	6.609	17.144
26	Kab. Pekalongan	16.541	8.834	0	4.289	11.210
27	Kab. Pemasang	20.627	7.801	0	8.086	26.712
28	Kab. Tegal	18.578	12.373	2.646	7.241	21.642
29	Kab. Brebes	27.824	2.566	0	16.210	30.955
30	Kota Magelang	823	0	0	926	1.388
31	Kota Surakarta	10.578	1.189	0	1.117	8.065
32	Kota Salatiga	4.791	1.552	0	2.872	3.222
33	Kota Semarang	19.734	6.041	2584	3.961	38.199
34	Kota Pekalongan	3.242	360	0	1.021	4.822
35	Kota Tegal	6.051	1.763	607	2.398	3.328
Jumlah		580.522	269.976	18.294	201.461	703.754

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 7. (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik				
		Partai Barisan Nasional (BARNAS)	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Amanat Nasional (PAN)	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kab. Cilacap	5.685	0	42.938	79.295	0
2	Kab. Banyumas	444	531	49.408	80.942	0
3	Kab. Purbalingga	2.813	1.300	33.777	35.279	0
4	Kab. Banjarnegara	2.369	0	34.849	60.884	0
5	Kab. Kebumen	4.806	3.716	29.569	46.578	0
6	Kab. Purworejo	1.023	0	20.043	18.726	92
7	Kab. Wonosobo	2.213	1.981	13.359	46.150	0
8	Kab. Magelang	1.766	0	37.796	58.589	0
9	Kab. Boyolali	651	0	38.893	64.347	0
10	Kab. Klaten	2.945	345	49.941	57.951	0
11	Kab. Sukoharjo	921	3.031	29.940	39.556	0
12	Kab. Wonogiri	1.486	0	51.209	36.454	0
13	Kab. Karanganyar	663	11.968	35.693	39.147	0
14	Kab. Sragen	533	396	31.027	27.257	0
15	Kab. Grobogan	1.026	5.893	26.573	28.061	0
16	Kab. Blora	2.328	7.858	18.835	14.629	15.165
17	Kab. Rembang	2.139	0	15.945	19.716	7
18	Kab. Pati	12.439	4.926	36.930	18.239	0
19	Kab. Kudus	7.038	0	14.565	36.254	3.607
20	Kab. Jepara	16.396	4.860	18.970	27.175	0
21	Kab. Demak	2.488	2.721	39.147	16.315	294
22	Kab. Semarang	1.424	15.215	37.159	39.628	0
23	Kab. Temanggung	1.284	3.481	21.451	50.345	0
24	Kab. Kendal	927	264	29.108	42.114	0
25	Kab. Batang	3.369	0	11.333	20.983	0
26	Kab. Pekalongan	4.171	150	11.078	46.001	0
27	Kab. Pemalang	6.848	2.296	39.960	51.018	0
28	Kab. Tegal	1.079	961	48.136	43.317	0
29	Kab. Brebes	5.177	0	47.274	56.044	0
30	Kota Magelang	578	1.393	4.651	5.378	0
31	Kota Surakarta	800	2.357	23.719	16.923	0
32	Kota Salatiga	360	7.595	10.709	7.250	0
33	Kota Semarang	3.880	7.193	66.248	48.978	0
34	Kota Pekalongan	101	174	6.307	20.694	0
35	Kota Tegal	1.552	200	6.858	9.798	1.284
	Jumlah	103.722	90.805	1.033.398	1.310.015	20.449

Sumber: KPUD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 7. (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik				
		Partai Keadaulatan (PK)	Partai Persatuan Daerah (PPD)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Pemuda Indonesia (PPI)	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Kab. Cilacap	1.477	1.169	35.653	924	1.350
2	Kab. Banyumas	4.328	401	68.869	3.345	1.371
3	Kab. Purbalingga	0	153	34.183	958	499
4	Kab. Banjarnegara	210	316	43.232	0	0
5	Kab. Kebumen	281	20	31.990	445	5
6	Kab. Purworejo	0	1.049	35.162	3.272	283
7	Kab. Wonosobo	0	0	61.744	363	0
8	Kab. Magelang	0	1.084	80.005	0	0
9	Kab. Boyolali	1.106	312	28.117	148	978
10	Kab. Klaten	851	256	17.825	151	1.642
11	Kab. Sukoharjo	0	1.613	13.914	546	435
12	Kab. Wonogiri	0	305	5.086	197	1.923
13	Kab. Karanganyar	2.038	4.490	21.807	1.530	449
14	Kab. Sragen	408	0	35.557	792	0
15	Kab. Grobogan	1.073	0	90.689	0	0
16	Kab. Blora	4.213	3.371	33.752	1.851	2.307
17	Kab. Rembang	0	2.817	37.784	143	659
18	Kab. Pati	0	9.593	37.229	19.866	831
19	Kab. Kudus	3.374	1.323	52.565	1.491	2.639
20	Kab. Jepara	450	4.441	37.196	1.506	3.942
21	Kab. Demak	1.278	741	100.826	1.366	563
22	Kab. Semarang	0	0	35.270	0	818
23	Kab. Temanggung	0	2.147	41.330	0	153
24	Kab. Kendal	0	700	63.777	436	284
25	Kab. Batang	406	576	37.608	0	981
26	Kab. Pekalongan	839	150	98.682	15	0
27	Kab. Pemasang	1.966	875	66.978	0	1.197
28	Kab. Tegal	504	226	108.961	0	812
29	Kab. Brebes	0	0	101.887	0	1.808
30	Kota Magelang	0	67	4.498	0	58
31	Kota Surakarta	388	249	2.893	1.329	108
32	Kota Salatiga	25	42	4.383	78	110
33	Kota Semarang	3.192	1.449	25.063	1.290	1.713
34	Kota Pekalongan	14	100	15.400	123	100
35	Kota Tegal	463	111	12.382	38	118
Jumlah		29.104	40.146	1.522.297	42.203	28.136

Sumber: KPUD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 7. (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik				
		Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)	Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan)	Partai Matahari Bangsa (PMB)	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Kab. Cilacap	4.872	301	4.249	0	95
2	Kab. Banyumas	4.974	2.118	5.056	505	7.684
3	Kab. Purbalingga	11.722	0	5.367	0	86
4	Kab. Banjarnegara	15.078	0	3.533	0	4.302
5	Kab. Kebumen	6.096	324	716	3	0
6	Kab. Purworejo	7.007	0	0	0	598
7	Kab. Wonosobo	10.055	0	1.887	0	0
8	Kab. Magelang	3.517	179	1.164	0	1.170
9	Kab. Boyolali	2.827	74	406	573	438
10	Kab. Klaten	3.580	323	11.374	795	2.381
11	Kab. Sukoharjo	4.752	0	0	0	140
12	Kab. Wonogiri	5.189	0	240	0	692
13	Kab. Karanganyar	3.445	285	1.383	138	646
14	Kab. Sragen	4.933	0	1.067	5.076	1.149
15	Kab. Grobogan	25.462	1.655	0	0	5.333
16	Kab. Blora	5.999	175	247	5.692	4.562
17	Kab. Rembang	1.780	27	0	0	181
18	Kab. Pati	26.321	1.926	690	837	3.520
19	Kab. Kudus	4.800	1.126	1.201	510	12.764
20	Kab. Jepara	911	5.437	648	269	707
21	Kab. Demak	19.635	1.053	265	0	1.309
22	Kab. Semarang	3.319	0	1.377	0	515
23	Kab. Temanggung	1.644	140	707	786	0
24	Kab. Kendal	5.315	4.476	1.466	405	3.069
25	Kab. Batang	7.377	166	158	0	213
26	Kab. Pekalongan	1.688	473	1.733	0	1.627
27	Kab. Pemasang	6.538	0	3100	0	697
28	Kab. Tegal	7.895	0	2.570	473	322
29	Kab. Brebes	8.575	231	6.558	0	9.700
30	Kota Magelang	430	867	624	80	678
31	Kota Surakarta	3.096	172	451	1.656	1.076
32	Kota Salatiga	1.479	0	233	50	83
33	Kota Semarang	11.167	1.066	2.698	2.011	2.734
34	Kota Pekalongan	1.276	207	320	0	1.005
35	Kota Tegal	2.243	232	3.546	0	60
Jumlah		234.997	23.033	65.034	19.859	69.536

Sumber: KPUD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 7. (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik				
		Partai Republikana Nusantara (RepublikaN)	Partai Pelopor	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Partai Damai Sejahtera (PDS)
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
1	Kab. Cilacap	3.708	0	129.697	47.538	0
2	Kab. Banyumas	2.510	0	83.028	29.765	628
3	Kab. Purbalingga	4.380	0	62.368	19.547	0
4	Kab. Banjarnegara	858	2.983	48.953	54.076	0
5	Kab. Kebumen	6	3	60.186	37.433	2
6	Kab. Purworejo	3.377	4.025	76.291	13.802	1.124
7	Kab. Wonosobo	329	0	43.942	37.117	878
8	Kab. Magelang	2.217	0	43.537	71.785	0
9	Kab. Boyolali	451	0	85.775	10.845	0
10	Kab. Klaten	671	2.549	132.113	27.723	1.220
11	Kab. Sukoharjo	750	252	52.016	18.274	3.562
12	Kab. Wonogiri	0	100	126.249	11.995	561
13	Kab. Karanganyar	17.920	14.084	83.027	9.350	1.967
14	Kab. Sragen	243	2.690	59.746	10.110	570
15	Kab. Grobogan	411	3.089	106.485	32.927	1.913
16	Kab. Blora	0	8.984	77.114	29.765	505
17	Kab. Rembang	354	8.937	45.369	46.264	0
18	Kab. Pati	2.462	21.015	56.569	23.904	0
19	Kab. Kudus	408	6.951	54.599	21.151	2.155
20	Kab. Jepara	814	400	52.545	81.465	7.915
21	Kab. Demak	4.296	1.235	71.128	39.772	598
22	Kab. Semarang	2.446	0	56.487	53.330	1.968
23	Kab. Temanggung	287	1.948	54.177	41.578	1.013
24	Kab. Kendal	877	517	81.927	34.722	0
25	Kab. Batang	542	3.739	28.470	28.403	0
26	Kab. Pekalongan	406	192	41.926	30.370	0
27	Kab. Pemasang	2.414	1.085	97.506	65.597	627
28	Kab. Tegal	0	56	57.712	31288	0
29	Kab. Brebes	836	0	96.468	50.038	0
30	Kota Magelang	485	0	7.565	1.612	1.962
31	Kota Surakarta	549	130	20.698	6.183	11.635
32	Kota Salatiga	333	61	8.886	3.257	2.150
33	Kota Semarang	2.283	1.763	61.764	23.221	17.336
34	Kota Pekalongan	176	73	35.542	14.427	0
35	Kota Tegal	246	116	17.484	2.456	736
Jumlah		58.045	86.977	2.220.349	1.061.090	61.025

Sumber: KPUD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 7. (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik				
		Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)	Partai Bulan Bintang (PBB)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Partai Bintang Reformasi (PBR)	Partai Patriot (PP)
(1)	(2)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
1	Kab. Cilacap	7.580	5.304	231.656	1.268	277
2	Kab. Banyumas	1.737	3.740	205.227	788	0
3	Kab. Purbalingga	0	1.499	116.328	2.788	0
4	Kab. Banjarnegara	0	3.659	60.551	6.283	435
5	Kab. Kebumen	854	4.586	168.178	2.348	3
6	Kab. Purworejo	159	14.036	66.804	0	3.599
7	Kab. Wonosobo	0	4.429	85.765	704	443
8	Kab. Magelang	0	6.113	145.300	1.769	321
9	Kab. Boyolali	548	10.825	143.105	613	0
10	Kab. Klaten	7.172	2.737	189.200	1.300	0
11	Kab. Sukoharjo	0	7.458	166.840	833	2.461
12	Kab. Wonogiri	261	2.133	209.954	1.955	161
13	Kab. Karanganyar	204	4.514	88.849	1.376	4.494
14	Kab. Sragen	2.767	2.371	170.952	961	79
15	Kab. Grobogan	28.179	5.861	126.993	3.250	416
16	Kab. Blora	5.975	10.595	85.687	4.380	97
17	Kab. Rembang	238	14.802	30.077	1.964	2.458
18	Kab. Pati	1.830	19.219	141.547	1.848	209
19	Kab. Kudus	54	7.496	49.434	8.799	50
20	Kab. Jepara	1.336	5.322	86.303	815	3.211
21	Kab. Demak	3.208	5.532	70.687	2.193	342
22	Kab. Semarang	243	2.143	99.800	4.609	0
23	Kab. Temanggung	121	1.337	64.233	705	771
24	Kab. Kendal	171	938	73.530	454	0
25	Kab. Batang	0	577	118.205	1.556	0
26	Kab. Pekalongan	41	5.039	83.789	330	497
27	Kab. Pemasang	774	0	113.684	0	5.966
28	Kab. Tegal	174	5.748	143.817	6.237	167
29	Kab. Brebes	435	1.295	186.163	177	0
30	Kota Magelang	0	0	13.591	385	563
31	Kota Surakarta	337	2.473	91.626	657	215
32	Kota Salatiga	14	131	15.747	62	0
33	Kota Semarang	1.794	8.447	115.172	1.727	4.730
34	Kota Pekalongan	77	1.815	19.020	64	0
35	Kota Tegal	0	455	27.491	37	0
Jumlah		66.283	172.629	3.805.305	63.235	31.965

Sumber: KPUD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 7. (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik				
		Partai Demokrat (PD)	Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)	Partai Indonesia Sejahtera (PIS)	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)	Partai Merdeka
(1)	(2)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
1	Kab. Cilacap	121.147	549	2.433	11.701	0
2	Kab. Banyumas	121.154	3.406	988	19.819	339
3	Kab. Purbalingga	52.725	0	0	5.947	0
4	Kab. Banjarnegara	44.749	0	0	8.584	0
5	Kab. Kebumen	86.882	2	1	29.592	5
6	Kab. Purworejo	61.014	0	0	6.718	58
7	Kab. Wonosobo	35.908	0	0	18.477	0
8	Kab. Magelang	80.000	915	0	42.686	89
9	Kab. Boyolali	57.378	279	7.732	4.873	0
10	Kab. Klaten	70.431	133	1.493	5.506	0
11	Kab. Sukoharjo	40.813	0	63	0	0
12	Kab. Wonogiri	44.491	0	1.319	331	0
13	Kab. Karanganyar	49.160	0	2.852	261	0
14	Kab. Sragen	46.942	0	3.507	6.665	0
15	Kab. Grobogan	57.786	0	1.187	12.325	607
16	Kab. Blora	58.961	0	76	3.965	0
17	Kab. Rembang	69.330	0	1.159	12.956	0
18	Kab. Pati	95.590	2.969	420	17.465	388
19	Kab. Kudus	34.019	0	3.978	17.996	28
20	Kab. Jepara	34.294	0	1.692	23.524	381
21	Kab. Demak	47.297	100	347	12.653	664
22	Kab. Semarang	58.361	912	0	8.086	0
23	Kab. Temanggung	44.202	0	554	25.152	0
24	Kab. Kendal	51.215	101	147	12.096	0
25	Kab. Batang	42.570	0	208	3.768	0
26	Kab. Pekalongan	14.954	0	0	15.782	114
27	Kab. Pemasang	35.763	0	0	13.891	225
28	Kab. Tegal	58.683	0	789	14.308	0
29	Kab. Brebes	87.225	0	0	10.818	268
30	Kota Magelang	15.001	60	191	1.094	0
31	Kota Surakarta	39.216	2.329	847	959	0
32	Kota Salatiga	10.842	90	5.637	619	0
33	Kota Semarang	196.766	5.385	1.414	11.139	620
34	Kota Pekalongan	5.901	0	276	5.564	0
35	Kota Tegal	18.672	0	0	550	51
Jumlah		1.989.442	17.230	39.310	385.870	3.837

Sumber: KPUD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 7. (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik			Total Suara Sah
		Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNU)	Partai Sarikat Indonesia	Partai Buruh	
(1)	(2)	(38)	(39)	(40)	(41)
1	Kab. Cilacap	0	0	2.483	844.018
2	Kab. Banyumas	107	0	643	791.802
3	Kab. Purbalingga	0	0	0	418.333
4	Kab. Banjarnegara	0	0	0	428.539
5	Kab. Kebumen	4	0	2	570.762
6	Kab. Purworejo	0	0	0	373.363
7	Kab. Wonosobo	150	0	154	405.118
8	Kab. Magelang	0	0	752	652.968
9	Kab. Boyolali	0	0	525	519.248
10	Kab. Klaten	0	0	396	658.884
11	Kab. Sukoharjo	0	0	531	410.195
12	Kab. Wonogiri	0	0	365	545.996
13	Kab. Karanganyar	0	0	296	449.801
14	Kab. Sragen	0	0	135	461.151
15	Kab. Grobogan	1100	85	0	659.770
16	Kab. Blora	0	48	0	454.806
17	Kab. Rembang	0	12	11	341.402
18	Kab. Pati	3.265	0	47	633.568
19	Kab. Kudus	0	214	126	405.186
20	Kab. Jepara	115	0	142	517.696
21	Kab. Demak	0	0	0	505.563
22	Kab. Semarang	0	0	0	489.842
23	Kab. Temanggung	0	0	1399	409.490
24	Kab. Kendal	126	0	111	464.020
25	Kab. Batang	0	0	0	368.618
26	Kab. Pekalongan	0	0	0	400.921
27	Kab. Pemasang	0	0	0	582.231
28	Kab. Tegal	634	0	11.003	608.352
29	Kab. Brebes	0	0	0	748.532
30	Kota Magelang	0	0	0	64.948
31	Kota Surakarta	0	0	487	254.507
32	Kota Salatiga	0	0	0	92.883
33	Kota Semarang	593	1.104	1517	705.976
34	Kota Pekalongan	0	0	0	138.201
35	Kota Tegal	0	0	0	121.326
Jumlah		6.094	1.464	21.125	16.498.016

Sumber: KPUD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 8. Jumlah Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin, Hasil Pemilu Legislatif 2009

No	Asal Partai Politik	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	15	8	23
2	Partai Demokrat	13	3	16
3	Partai Golongan Karya	8	3	11
4	Partai Keadilan Sejahtera (Golkar)	10	0	10
5	Partai Amanat Nasional (PAN)	9	1	10
6	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	9	0	9
7	Partai GERINDA	8	1	9
8	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	7	0	7
9	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1	3	4
10	PKNU	1	0	1
Jumlah		81	19	100

Sumber: Sekretariat DPRD

**Tabel 9. Waktu Pelaksanaan Pilkada Terakhir
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**

No	Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan	
		Gubernur	Bupati/Walikota
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab. Cilacap		09 September 2007
2	Kab. Banyumas		10 Februari 2008
3	Kab. Purbalingga		18 April 2010
4	Kab. Banjarnegara		12 September 2006
5	Kab. Kebumen		11 April 2010
6	Kab. Purworejo		31 Juli 2010
7	Kab. Wonosobo		02 Agustus 2010
8	Kab. Magelang		26 Oktober 2008
9	Kab. Boyolali		09 Mei 2010
10	Kab. Klaten		20 September 2010
11	Kab. Sukoharjo		03 Juni 2010
12	Kab. Wonogiri		16 September 2010
13	Kab. Karanganyar		26 Oktober 2008
14	Kab. Sragen		25 Maret 2006
15	Kab. Grobogan		29 Januari 2006
16	Kab. Bora		03 Juni 2010
17	Kab. Rembang		26 April 2010
18	Kab. Pati		24 Juli 2006
19	Kab. Kudus		12 April 2008
20	Kab. Jepara		04 Februari 2007
21	Kab. Demak		26 Februari 2006
22	Kab. Semarang		31 Juli 2010
23	Kab. Temanggung		22 Juni 2008
24	Kab. Kendal		06 Juni 2010
25	Kab. Batang		10 Desember 2006
26	Kab. Pekalongan		21 Mei 2006
27	Kab. Pemasang		31 Oktober 2010
28	Kab. Tegal		26 Oktober 2008
29	Kab. Brebes		04 November 2007
30	Kota Magelang		06 Juni 2010
31	Kota Surakarta		26 April 2010
32	Kota Salatiga		07 Mei 2006
33	Kota Semarang		18 April 2010
34	Kota Pekalongan		7 April 2010
35	Kota Tegal		26 Oktober 2008
Provinsi Jawa Tengah		22 Juni 2008	

Sumber: KPUD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 10. Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati/Walikota

No	Kabupaten/Kota	Pilkada Gubernur		Pilkada Bupati/Walikota	
		Terdaftar	Menggunakan Hak Pilih	Terdaftar	Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	1.346.146	799.497	1.311.331	895.109
2	Kab. Banyumas	1.255.683	757.393	1.245.896	909.062
3	Kab. Purbalingga	668.502	426.892	689.384	460.041
4	Kab. Banjarnegara	711.655	442.335	698.430	509.625
5	Kab. Kebumen (I)	941.921	619.727	973.723	614.966
	Putaran II			973.723	559.692
6	Kab. Purworejo (I)	613.843	383.426	633.806	398.489
	Putaran II			633.806	372.679
7	Kab. Wonosobo	600.660	422.594	624.996	453.522
8	Kab. Magelang	907.967	666.767	902.404	654.098
9	Kab. Boyolali	771.291	458.221	769.994	559.861
10	Kab. Klaten	1.010.127	625.700	1.015.833	673.748
11	Kab. Sukoharjo	651.082	402.363	657.774	433.020
12	Kab. Wonogiri	900.102	550.876	915.178	600.065
13	Kab. Karanganyar	655.849	421.900	657.503	454.023
14	Kab. Sragen	715.044	447.377	676.502	484.587
15	Kab. Grobogan	1.034.825	525.061	981.802	686.451
16	Kab. Blora	676.393	417.591	688.244	493.478
17	Kab. Rembang	454.277	274.596	458.795	345.602
18	Kab. Pati	993.239	457.098	952.200	493.083
19	Kab. Kudus	575.665	183.059	572.345	323.540
20	Kab. Jepara	799.696	350.229	779.630	429.335
21	Kab. Demak	776.075	341.547	740.939	575.271
22	Kab. Semarang	704.993	438.061	735.418	489.405
23	Kab. Temanggung	554.971	449.865	555.032	449.748
24	Kab. Kendal	721.017	426.182	732.017	515.070
25	Kab. Batang	545.737	337.076	522.382	405.694
26	Kab. Pekalongan	649.231	351.765	611.614	452.700
27	Kab. Pemalang	1.048.597	558.465	1.052.133	595.739
28	Kab. Tegal	1.114.336	610.291	1.124.230	643.041
29	Kab. Brebes	1.383.467	678.465	1.361.954	803.109
30	Kota Magelang	93.199	64.502	93.850	67.370
31	Kota Surakarta	383.871	238.420	393.703	282.689
32	Kota Salatiga	121.955	82.453	121.573	93.099
33	Kota Semarang	1.084.694	681.730	1.100.337	660.851
34	Kota Pekalongan	201.456	106.992	209.935	147.034
35	Kota Tegal	187.976	117.874	195.704	129.621
Provinsi Jawa Tengah		25.855.542	15.116.390		

Sumber: KPU D Provinsi Jawa Tengah

Tabel 11. Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih Dalam Pilkada Gubernur Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Pilkada Gubernur		
		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	766.832	32.665	546.276
2	Kab. Banyumas	713.649	43.744	498.290
3	Kab. Purbalingga	396.964	29.928	241.610
4	Kab. Banjarnegara	406.083	36.252	269.320
5	Kab. Kebumen	599.212	20.515	322.194
6	Kab. Purworejo	362.514	20.912	230.417
7	Kab. Wonosobo	359.675	62.919	178.066
8	Kab. Magelang	612.541	54.226	241.200
9	Kab. Boyolali	430.211	28.010	313.070
10	Kab. Klaten	580.936	44.764	384.427
11	Kab. Sukoharjo	372.539	29.824	248.719
12	Kab. Wonogiri	533.582	17.294	349.226
13	Kab. Karanganyar	393.534	28.366	233.949
14	Kab. Sragen	432.739	14.638	267.667
15	Kab. Grobogan	501.323	23.738	509.764
16	Kab. Blora	393.594	23.997	258.802
17	Kab. Rembang	254.543	20.053	179.681
18	Kab. Pati	433.110	23.988	536.141
19	Kab. Kudus	172.347	10.712	392.606
20	Kab. Jepara	331.586	18.643	449.467
21	Kab. Demak	313.129	28.418	434.528
22	Kab. Semarang	393.513	44.548	266.932
23	Kab. Temanggung	403.988	45.877	105.106
24	Kab. Kendal	364.597	61.585	294.835
25	Kab. Batang	298.705	38.371	208.661
26	Kab. Pekalongan	319.623	32.142	297.466
27	Kab. Pemasang	514.511	43.954	490.132
28	Kab. Tegal	560.248	50.043	504.045
29	Kab. Brebes	652.882	25.583	705.002
30	Kota Magelang	54.855	9.647	28.697
31	Kota Surakarta	212.176	26.244	145.451
32	Kota Salatiga	70.035	12.418	39.502
33	Kota Semarang	602.803	78.927	402.964
34	Kota Pekalongan	89.031	17.961	94.464
35	Kota Tegal	109.432	8.442	70.102
Provinsi Jawa Tengah		14.007.042	1.109.348	10.739.152

Sumber: KPUD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 12. Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pilkada Bupati/Walikota

No	Kabupaten/Kota	Pilkada Bupati/Walikota		
		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	873.292	21.817	416.222
2	Kab. Banyumas	883.503	25.559	336.834
3	Kab. Purbalingga	408.331	51.710	229.323
4	Kab. Banjarnegara	494.629	14.996	188.805
5	Kab. Kebumen (Putaran I)	592.168	22.789	358.766
	(Putaran II)	538.817	20.875	414.031
6	Kab. Purworejo (Putaran I)	375.506	22.983	235.317
	(Putaran II)	347.656	25.023	261.127
7	Kab. Wonosobo	412.376	41.146	171.474
8	Kab. Magelang	612.794	41.304	248.306
9	Kab. Boyolali	540.192	19.669	210.133
10	Kab. Klaten	618.245	55.503	342.085
11	Kab. Sukoharjo	404.618	28.402	224.754
12	Kab. Wonogiri	586.288	13.777	315.113
13	Kab. Karanganyar	439.372	14.651	203.480
14	Kab. Sragen	452.883	31.704	191.915
15	Kab. Grobogan	664.599	21.852	295.351
16	Kab. Blora	480.437	13.041	194.766
17	Kab. Rembang	334.345	11.257	113.193
18	Kab. Pati	421.148	71.935	459.117
19	Kab. Kudus	304.855	18.685	248.805
20	Kab. Jepara	405.908	23.427	350.295
21	Kab. Demak	559.273	15.998	165.668
22	Kab. Semarang	459.018	30.387	246.013
23	Kab. Temanggung	414.001	35.747	105.284
24	Kab. Kendal	479.195	35.875	216.947
25	Kab. Batang	384.680	21.014	116.688
26	Kab. Pekalongan	434.703	17.997	158.914
27	Kab. Pemasang	567.935	27.804	456.394
28	Kab. Tegal	613.562	29.479	481.189
29	Kab. Brebes	768.833	34.276	558.845
30	Kota Magelang	62.419	4.951	26.480
31	Kota Surakarta	275.549	7.140	111.014
32	Kota Salatiga	87.317	5.782	28.474
33	Kota Semarang	616.480	44.371	439.486
34	Kota Pekalongan	139.332	7.702	62.901
35	Kota Tegal	124.481	5.140	66.083

Sumber: KPUD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 13. Perolehan Suara Kepala Daerah dan Partai Pendukungnya

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kandidat	Perolehan Suara Sah		Partai Pendukung
			Jumlah	Persen tase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	2	446.703	51,14	PDIP
2	Kab. Banyumas	4	321.106	36,34	PKB
3	Kab. Purbalingga	3	235.158	57,59	PDIP; PAN; PKS; PKB
4	Kab. Banjarnegara	3	207.155	41,88	P.GOLKAR; PPP; PBB
5	Kab. Kebumen (I)	4	174.163	29,41	PAN;PPP;PKNU;Gerindra
	Putaran II	2	272.779	50,91	PAN;PPP;PKNU;Gerindra
6	Kab. Purworejo (I)	9	71.039	18,92	PAN; PPP; PPI; P.Pelopor
	Putaran II	2	185.847	53,46	P. GOLKAR
7	Kab. Wonosobo	5	221.698	51,34	PKB; P. GOLKAR; PPP
8	Kab. Magelang	2	514.890	84,02	PDIP; PKB; PAN; P.Demokrat
9	Kab. Boyolali	4	240.682	44,55	PDIP;PKB
10	Kab. Klaten	3	397.106	64,23	PDIP; PKS; P.Demokrat
11	Kab. Sukoharjo	3	199.612	49,33	PDIP
12	Kab. Wonogiri	4	236.645	40,36	PAN; Gerindra; PPP
13	Kab. Karanganyar	3	271.040	59,70	PDIP; PKS; PKPB; P.Pelopor
14	Kab. Sragen	2	395.539	87,34	PDIP; P.GOLKAR
15	Kab. Grobogan	3	297.777	44,81	P.GOLKAR
16	Kab. Blora	3	243.715	59,73	Demokrat; PPP;PKB;Hanura; PPIB;PDIP
17	Kab. Rembang	5	187.106	55,96	P.Demokrat
18	Kab. Pati	4	195.599	46,44	PDIP; P.Demokrat
19	Kab. Kudus	4	133.776	43,88	PDIP; P.GOLKAR
20	Kab. Jepara	3	241.333	56,21	PPP;P.Demokrat;PDS
21	Kab. Demak	4	245.805	43,95	PKB; PKS
22	Kab. Semarang	3	205.382	44,74	PDIP; P.Demokrat; PAN; P.Hanura
23	Kab. Temanggung	3	145.323	35,10	P.GOLKAR; P. Demokrat
24	Kab. Kendal	5	207.116	43,22	PDIP
25	Kab. Batang	2	294.770	76,60	PDIP
26	Kab. Pekalongan	2	226.995	52,22	PKB; P.GOLKAR
27	Kab. Pemasang	4	264.224	46,52	PDIP
28	Kab. Tegal	4	261.855	42,68	PDIP
29	Kab. Brebes	4	351.539	45,72	PDIP
30	Kota Magelang	4	27.170	43,53	PDIP; PAN; PKS
31	Kota Surakarta	2	248.243	90,09	PDIP
32	Kota Salatiga	4	31.764	36,38	PDIP;PAN
33	Kota Semarang	5	211.323	34,28	PDIP
34	Kota Pekalongan	3	53.963	53,08	P.GOLKAR
35	Kota Tegal	5	88.329	70,96	PDIP; PKS;P.Demokrat; PPP
Provinsi (Gubernur)		5	6.084.261	43,44	PDIP

Sumber: KPUD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 14. Kepala Daerah Hasil Pilkada menurut Jenis Kelamin, Pendidikan dan Jabatan Sebelumnya

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Usia saat terpilih	Jabatan/Pekerjaan sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	Laki-laki	STM	50	Pengusaha
2	Kab. Banyumas	Laki-laki	S2	62	Pensiunan PNS
3	Kab. Purbalingga	Laki-laki	S2	59	PNS
4	Kab. Banjarnegara	Laki-laki	S2	51	PNS Pemkab Banjarnegara
5	Kab. Kebumen	Laki-laki	S1	46	Pengusaha
6	Kab. Purworejo	Laki-laki	S2		Bupati Purworejo 2005-2010
7	Kab. Wonosobo	Laki-laki	S1		Bupati Wonosobo 2005-2010
8	Kab. Magelang	Laki-laki	S1		
9	Kab. Boyolali	Laki-laki	S1	46	Wakil Bupati Boyolali
10	Kab. Klaten	Laki-laki	S1		Bupati Klaten 2005-2010
11	Kab. Sukoharjo	Laki-laki	S2	50	Anggota DPRD Sukoharjo
12	Kab. Wonogiri	Laki-laki	SMU	45	Pengusaha
13	Kab. Karanganyar	Perempuan	S2	46	Bupati Karanganyar 2003-2008
14	Kab. Sragen	Laki-laki	S1		Bupati Sragen 2001-2006
15	Kab. Grobogan	Laki-laki	S1	48	Wakil Bupati Grobogan
16	Kab. Blora	Laki-laki	S1		Mantan Dandim Rembang
17	Kab. Rembang	Laki-laki	SMU	39	Bupati Rembang 2005-2010
18	Kab. Pati	Laki-laki	S1		Bupati Pati 2001-2006
19	Kab. Kudus	Laki-laki	S1	45	Anggota DPRD Prov Jateng
20	Kab. Jepara	Laki-laki	S2	54	Bupati Jepara 2002-2007
21	Kab. Demak	Laki-laki	S2		
22	Kab. Semarang	Laki-laki	S2	57	PNS
23	Kab. Temanggung	Laki-laki	S1	62	Pensiunan PNS
24	Kab. Kendal	Perempuan	S2	46	Anggota DPRD Kab. Kendal
25	Kab. Batang	Laki-laki	S1	40	Bupati Batang 2002-2007
26	Kab. Pekalongan	Perempuan	S2		Wakil Bupati Pekalongan
27	Kab. Pemasang	Laki-laki	S2	48	Wakil Bupati Pemasang
28	Kab. Tegal	Laki-laki	S2	43	Bupati Tegal 2004-2009
29	Kab. Brebes	Laki-laki	S2	48	Wakil Bupati Brebes 2007-2011
30	Kota Magelang	Laki-laki	S2		PNS
31	Kota Surakarta	Laki-laki	S1	50	Walikota Surakarta 2005-2010
32	Kota Salatiga	Laki-laki	S1	61	Wakil Walikota Salatiga
33	Kota Semarang	Laki-laki	S2	51	PNS Pemkot Semarang
34	Kota Pekalongan	Laki-laki	S1		Walikota Pekalongan 2005-2010
35	Kota Tegal	Laki-laki	S1	35	Pengusaha
	Gubernur	Laki-laki	AKABRI DARAT	59	Purnawirawan TNI

Sumber: KPUD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 15. Jumlah Kantor Polisi menurut Kabupaten/Kota dan Wilayah Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

No	Kabupaten/Kota	Poltabes	Polres/ Polresta	Polsek/ Polsekta	Pos Polisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	0	1	23	0
2	Kab. Banyumas	0	1	27	0
3	Kab. Purbalingga	0	1	16	0
4	Kab. Banjarnegara	0	1	20	0
5	Kab. Kebumen	0	1	26	0
6	Kab. Purworejo	0	1	16	0
7	Kab. Wonosobo	0	1	14	0
8	Kab. Magelang	0	1	21	0
9	Kab. Boyolali	0	1	19	0
10	Kab. Klaten	0	1	24	0
11	Kab. Sukoharjo	0	1	12	0
12	Kab. Wonogiri	0	1	25	0
13	Kab. Karanganyar	0	1	17	0
14	Kab. Sragen	0	1	20	0
15	Kab. Grobogan	0	1	19	0
16	Kab. Blora	0	1	16	0
17	Kab. Rembang	0	1	14	0
18	Kab. Pati	0	1	20	0
19	Kab. Kudus	0	1	9	0
20	Kab. Jepara	0	1	14	0
21	Kab. Demak	0	1	14	0
22	Kab. Semarang	0	1	16	0
23	Kab. Temanggung	0	1	14	0
24	Kab. Kendal	0	1	16	0
25	Kab. Batang	0	1	12	0
26	Kab. Pekalongan	0	1	15	0
27	Kab. Pemasang	0	1	14	0
28	Kab. Tegal	0	1	18	0
29	Kab. Brebes	0	1	17	0
30	Kota Magelang	0	1	3	0
31	Kota Surakarta	0	1	5	0
32	Kota Salatiga	0	1	4	0
33	Kota Semarang	1	0	14	5
34	Kota Pekalongan	0	1	6	0
35	Kota Tegal	0	1	4	0
	Provinsi Jawa Tengah	1	34	544	5

Sumber: Polda Jawa Tengah

**Tabel 16. Jumlah Polisi dan Rasio Penduduk per Polisi
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi			Rasio Penduduk per Polisi
		Laki-laki	Perempuan	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	1.027	17	1.044	1.571
2	Kab. Banyumas	1.382	53	1.435	1.082
3	Kab. Purbalingga	770	25	795	1.068
4	Kab. Banjarnegara	643	8	651	1.315
5	Kab. Kebumen	921	23	944	1.227
6	Kab. Purworejo	866	24	890	780
7	Kab. Wonosobo	593	12	605	1.247
8	Kab. Magelang	1.059	38	1.097	1.077
9	Kab. Boyolali	812	26	838	1.111
10	Kab. Klaten	1.131	33	1.164	970
11	Kab. Sukoharjo	831	28	859	959
12	Kab. Wonogiri	740	17	757	1.226
13	Kab. Karanganyar	709	27	736	1.104
14	Kab. Sragen	930	23	953	898
15	Kab. Grobogan	857	19	876	1.493
16	Kab. Blora	798	11	809	1.025
17	Kab. Rembang	637	10	647	914
18	Kab. Pati	1.188	41	1.229	968
19	Kab. Kudus	728	29	757	1.027
20	Kab. Jepara	661	21	682	1.608
21	Kab. Demak	716	27	743	1.425
22	Kab. Semarang	826	42	868	1.075
23	Kab. Temanggung	625	20	645	1.097
24	Kab. Kendal	756	23	779	1.156
25	Kab. Batang	575	16	591	1.194
26	Kab. Pekalongan	562	11	573	1.462
27	Kab. Pemasang	764	11	775	1.628
28	Kab. Tegal	691	13	704	1.977
29	Kab. Brebes	743	9	752	2.364
30	Kota Magelang	518	36	554	213
31	Kota Surakarta	1.214	90	1.304	383
32	Kota Salatiga	458	27	485	352
33	Kota Semarang	3.109	161	3.270	475
34	Kota Pekalongan	590	25	615	458
35	Kota Tegal	524	10	534	453
	Provinsi Jawa Tengah	29.954	1.006	30.960	1.045

Sumber: Polda Jawa Tengah

Tabel 17. Nilai Beberapa Indikator Kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah menurut Jenis Indikator Tahun 2008 – 2010

Jenis Indikator	Tahun		
	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(3)
Jumlah Tindak Pidana (<i>Crime Total</i>)	16.630	31.016	13.035
Jumlah Tindak Pidana yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>)	12.475	22.942	9.198
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (<i>Clearance Rate</i>)	75	74	71
Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (<i>Crime Clock</i>)	0.31'42"	0.16'57"	0.40'19"
Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (<i>Crime Rate</i>)	51	96	40

Sumber: Polda Jawa Tengah

Tabel 18. Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (*Crime Total*) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	481	993	400
2	Kab. Banyumas	425	1103	356
3	Kab. Purbalingga	326	628	282
4	Kab. Banjarnegara	171	430	189
5	Kab. Kebumen	404	754	348
6	Kab. Purworejo	415	527	260
7	Kab. Wonosobo	281	574	284
8	Kab. Magelang	564	1141	470
9	Kab. Boyolali	372	476	289
10	Kab. Klaten	766	1517	627
11	Kab. Sukoharjo	442	850	368
12	Kab. Wonogiri	259	503	243
13	Kab. Karanganyar	535	605	299
14	Kab. Sragen	268	739	332
15	Kab. Grobogan	408	903	408
16	Kab. Blora	358	569	239
17	Kab. Rembang	304	593	266
18	Kab. Pati	411	750	356
19	Kab. Kudus	569	1426	520
20	Kab. Jepara	858	912	383
21	Kab. Demak	371	648	300
22	Kab. Semarang	482	1157	501
23	Kab. Temanggung	448	793	344
24	Kab. Kendal	456	752	368
25	Kab. Batang	149	318	182
26	Kab. Pekalongan	292	493	243
27	Kab. Pemalang	275	485	287
28	Kab. Tegal	241	439	250
29	Kab. Brebes	262	461	248
30	Kota Magelang	217	274	150
31	Kota Surakarta	1070	2108	955
32	Kota Salatiga	326	443	225
33	Kota Semarang	3046	5732	1629
34	Kota Pekalongan	223	435	200
35	Kota Tegal	155	485	234
	Provinsi Jawa Tengah	16.630	31.016	13.035

Sumber: Polda Jawa Tengah

**Tabel 19. Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*)
Per 1.000 penduduk menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010**

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	32	63	24
2	Kab. Banyumas	30	74	23
3	Kab. Purbalingga	47	81	33
4	Kab. Banjarnegara	24	54	21
5	Kab. Kebumen	40	70	30
6	Kab. Purworejo	78	86	37
7	Kab. Wonosobo	47	85	37
8	Kab. Magelang	55	103	39
9	Kab. Boyolali	48	56	31
10	Kab. Klaten	79	144	55
11	Kab. Sukoharjo	67	114	44
12	Kab. Wonogiri	34	59	26
13	Kab. Karanganyar	82	82	36
14	Kab. Sragen	38	95	38
15	Kab. Grobogan	35	73	31
16	Kab. Blora	54	76	28
17	Kab. Rembang	71	116	45
18	Kab. Pati	40	67	29
19	Kab. Kudus	93	204	66
20	Kab. Jepara	92	89	34
21	Kab. Demak	41	66	28
22	Kab. Semarang	63	136	53
23	Kab. Temanggung	82	126	48
24	Kab. Kendal	62	91	40
25	Kab. Batang	27	51	25
26	Kab. Pekalongan	43	65	29
27	Kab. Pemasang	25	41	22
28	Kab. Tegal	19	33	18
29	Kab. Brebes	16	27	14
30	Kota Magelang	216	251	126
31	Kota Surakarta	320	503	190
32	Kota Salatiga	255	283	131
33	Kota Semarang	219	389	104
34	Kota Pekalongan	193	217	70
35	Kota Tegal	82	227	96
	Provinsi Jawa Tengah	51	96	40

Sumber: Polda Jawa Tengah

**Tabel 20. Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*)
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010**

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	18.15'43"	8.49'18"	21.54'00"
2	Kab. Banyumas	20.40'06"	7.56'31"	0.36'24"
3	Kab. Purbalingga	2.56'41"	13.56'57"	7.03'50"
4	Kab. Banjarnegara	3.22'06"	20.22'20"	22.20'57"
5	Kab. Kebumen	21.44'33"	11.37'05"	1.10'21"
6	Kab. Purworejo	21.09'59"	16.37'21"	9.41'32"
7	Kab. Wonosobo	7.15'35"	15.15'41"	6.50'42"
8	Kab. Magelang	15.34'28"	7.40'39"	18.38'18"
9	Kab. Boyolali	23.36'46"	18.24'12"	6.18'41"
10	Kab. Klaten	11.28'03"	5.46'28"	13.58'17"
11	Kab. Sukoharjo	19.52'24"	10.18'21"	23.48'16"
12	Kab. Wonogiri	9.54'54"	17.24'56"	12.02'58"
13	Kab. Karanganyar	16.25'07"	14.28'46"	5.17'52"
14	Kab. Sragen	8.46'34"	11.51'14"	2.23'08"
15	Kab. Grobogan	21.31'46"	9.42'04"	21.28'14"
16	Kab. Blora	0.32'11"	15.23'44"	12.39'10"
17	Kab. Rembang	4.53'41"	14.46'20"	8.55'56"
18	Kab. Pati	21.22'20"	11.40'48"	0.36'24"
19	Kab. Kudus	15.26'15"	6.08'35"	16.50'46"
20	Kab. Jepara	10.14'16"	9.36'19"	22.52'19"
21	Kab. Demak	23.40'36"	13.31'07"	5.12'00"
22	Kab. Semarang	18.13'27"	7.34'17"	17.29'06"
23	Kab. Temanggung	19.36'26"	11.02'48"	1.27'54"
24	Kab. Kendal	19.15'47"	11.38'56"	23.48'16"
25	Kab. Batang	10.57'11"	3.32'50"	0.07'55"
26	Kab. Pekalongan	6.04'56"	17.46'08"	12.02'58"
27	Kab. Pemasang	7.56'31"	18.03'42"	6.31'22"
28	Kab. Tegal	12.26'53"	19.57'16"	11.02'24"
29	Kab. Brebes	9.31'36"	19.00'08"	11.19'21"
30	Kota Magelang	16.28'45"	7.58'15"	10.24'00"
31	Kota Surakarta	8.12'34"	4.09'20"	9.10'22"
32	Kota Salatiga	2.56'41"	19.46'27"	14.56'00"
33	Kota Semarang	2.53'02"	1.31'42"	5.22'39"
34	Kota Pekalongan	15.23'24"	20.08'17"	19.48'00"
35	Kota Tegal	8.40'15"	18.03'43"	13.26'09"
	Provinsi Jawa Tengah	0.31'42"	0.16'57"	0.40'19"

Sumber: Polda Jawa Tengah

Tabel 21. Jumlah Pidana Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	472	856	313
2	Kab. Banyumas	399	674	218
3	Kab. Purbalingga	249	487	218
4	Kab. Banjarnegara	257	457	163
5	Kab. Kebumen	320	606	273
6	Kab. Purworejo	304	463	202
7	Kab. Wonosobo	150	329	160
8	Kab. Magelang	390	809	337
9	Kab. Boyolali	258	456	240
10	Kab. Klaten	610	1.200	475
11	Kab. Sukoharjo	349	725	272
12	Kab. Wonogiri	211	448	192
13	Kab. Karanganyar	560	493	208
14	Kab. Sragen	297	673	288
15	Kab. Grobogan	364	801	326
16	Kab. Blora	319	482	181
17	Kab. Rembang	223	486	206
18	Kab. Pati	299	652	274
19	Kab. Kudus	439	1.122	401
20	Kab. Jepara	639	739	301
21	Kab. Demak	322	481	235
22	Kab. Semarang	375	802	346
23	Kab. Temanggung	300	594	232
24	Kab. Kendal	309	518	262
25	Kab. Batang	142	294	113
26	Kab. Pekalongan	203	346	159
27	Kab. Pemasang	254	455	186
28	Kab. Tegal	224	421	179
29	Kab. Brebes	231	471	178
30	Kota Magelang	134	192	84
31	Kota Surakarta	661	1.324	637
32	Kota Salatiga	245	351	156
33	Kota Semarang	1660	3.145	904
34	Kota Pekalongan	172	279	123
35	Kota Tegal	134	311	156
	Provinsi Jawa Tengah	12.475	22.942	9.198

Sumber: Polda Jawa Tengah

Tabel 22. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (*Clearance Rate*) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	98	86	78
2	Kab. Banyumas	94	61	61
3	Kab. Purbalingga	76	78	77
4	Kab. Banjarnegara	150	106	86
5	Kab. Kebumen	79	80	78
6	Kab. Purworejo	73	88	78
7	Kab. Wonosobo	53	57	56
8	Kab. Magelang	69	71	72
9	Kab. Boyolali	69	96	83
10	Kab. Klaten	80	79	76
11	Kab. Sukoharjo	79	85	74
12	Kab. Wonogiri	81	89	79
13	Kab. Karanganyar	105	81	70
14	Kab. Sragen	111	91	87
15	Kab. Grobogan	89	89	80
16	Kab. Blora	89	85	76
17	Kab. Rembang	73	82	77
18	Kab. Pati	73	87	77
19	Kab. Kudus	77	79	77
20	Kab. Jepara	74	81	79
21	Kab. Demak	87	74	78
22	Kab. Semarang	78	69	69
23	Kab. Temanggung	67	75	67
24	Kab. Kendal	68	69	71
25	Kab. Batang	95	92	62
26	Kab. Pekalongan	70	70	65
27	Kab. Pemalang	92	94	65
28	Kab. Tegal	93	96	72
29	Kab. Brebes	88	102	72
30	Kota Magelang	62	70	56
31	Kota Surakarta	62	63	67
32	Kota Salatiga	75	79	69
33	Kota Semarang	54	55	55
34	Kota Pekalongan	77	64	62
35	Kota Tegal	86	64	67
	Provinsi Jawa Tengah	75	74	71

Sumber: Polda Jawa Tengah

**Tabel 23. Jumlah Tindak Pidana Terhadap Fisik Manusia
menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tindak Pidana
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010**

No	Kabupaten/Kota	Jenis Tindak Pidana				
		Pembunuhan	Perkosaan	Penganiayaan Ringan	Penganiayaan Berat	Penculikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	1	6	23	2	0
2	Kab. Banyumas	0	1	18	13	1
3	Kab. Purbalingga	2	1	8	5	0
4	Kab. Banjarnegara	0	2	10	0	1
5	Kab. Kebumen	3	1	10	11	2
6	Kab. Purworejo	4	3	19	12	1
7	Kab. Wonosobo	0	0	11	2	0
8	Kab. Magelang	1	2	12	13	2
9	Kab. Boyolali	1	7	10	3	0
10	Kab. Klaten	3	7	8	3	2
11	Kab. Sukoharjo	0	1	7	14	0
12	Kab. Wonogiri	2	3	9	2	6
13	Kab. Karanganyar	2	1	13	15	0
14	Kab. Sragen	2	0	6	25	1
15	Kab. Grobogan	1	0	8	0	0
16	Kab. Blora	3	2	13	0	1
17	Kab. Rembang	0	0	11	0	0
18	Kab. Pati	8	8	18	24	6
19	Kab. Kudus	0	1	13	1	0
20	Kab. Jepara	3	16	24	4	0
21	Kab. Demak	0	3	16	12	2
22	Kab. Semarang	2	7	12	14	2
23	Kab. Temanggung	1	2	11	6	1
24	Kab. Kendal	4	3	18	29	6
25	Kab. Batang	0	2	9	2	2
26	Kab. Pekalongan	1	0	11	0	2
27	Kab. Pemalang	1	2	9	4	0
28	Kab. Tegal	4	2	9	12	1
29	Kab. Brebes	4	8	26	1	2
30	Kota Magelang	1	0	6	6	1
31	Kota Surakarta	22	3	31	8	9
32	Kota Salatiga	0	0	8	9	0
33	Kota Semarang	2	8	46	17	11
34	Kota Pekalongan	0	2	6	0	0
35	Kota Tegal	1	0	6	19	0
Provinsi Jawa Tengah		79	104	475	288	62

Sumber: Polda Jawa Tengah

**Tabel 24. Jumlah Tindak Pidana Terhadap Hak Milik (Barang)
menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tindak Pidana
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010**

No	Kabupaten/Kota	Jenis Tindak Pidana				
		Pembakaran dengan sengaja	Pengrusakan/Penghancuran barang	Pencurian dengan Pemberatan	Pencurian ringan	Pencurian dengan kekerasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	0	1	77	1	12
2	Kab. Banyumas	1	0	57	2	2
3	Kab. Purbalingga	0	2	58	2	12
4	Kab. Banjarnegara	0	1	63	0	5
5	Kab. Kebumen	0	0	65	1	4
6	Kab. Purworejo	0	1	95	0	13
7	Kab. Wonosobo	0	1	62	2	5
8	Kab. Magelang	0	1	49	1	15
9	Kab. Boyolali	0	1	51	0	9
10	Kab. Klaten	0	0	121	1	7
11	Kab. Sukoharjo	0	1	63	1	1
12	Kab. Wonogiri	0	2	44	1	5
13	Kab. Karanganyar	0	2	57	1	4
14	Kab. Sragen	0	1	90	1	4
15	Kab. Grobogan	0	1	32	1	8
16	Kab. Blora	0	0	50	2	2
17	Kab. Rembang	0	0	38	2	2
18	Kab. Pati	1	5	90	2	14
19	Kab. Kudus	0	1	71	1	7
20	Kab. Jepara	0	1	95	1	5
21	Kab. Demak	0	1	67	1	4
22	Kab. Semarang	1	2	88	2	12
23	Kab. Temanggung	0	0	49	1	4
24	Kab. Kendal	0	1	74	2	12
25	Kab. Batang	0	0	28	1	4
26	Kab. Pekalongan	0	0	75	1	9
27	Kab. Pemalang	0	1	42	3	7
28	Kab. Tegal	1	2	53	1	15
29	Kab. Brebes	1	3	63	2	12
30	Kota Magelang	0	0	55	0	7
31	Kota Surakarta	2	5	115	11	9
32	Kota Salatiga	0	1	37	0	2
33	Kota Semarang	2	6	203	16	29
34	Kota Pekalongan	1	1	46	0	2
35	Kota Tegal	0	1	60	1	16
Provinsi Jawa Tengah		10	46	2.387	65	280

Sumber: Polda Jawa Tengah

Tabel 24. (Lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Jenis Tindak Pidana				
		Pencurian dalam keluarga	Penipuan/Perbuatan curang	Penadahan	Pencurian Kendaraan bermotor	Pencurian lainnya
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kab. Cilacap	0	41	0	53	37
2	Kab. Banyumas	0	32	2	46	28
3	Kab. Purbalingga	0	8	0	10	14
4	Kab. Banjarnegara	0	26	0	33	21
5	Kab. Kebumen	0	14	1	10	10
6	Kab. Purworejo	0	23	0	34	18
7	Kab. Wonosobo	0	28	0	41	23
8	Kab. Magelang	0	42	0	53	38
9	Kab. Boyolali	0	19	0	22	17
10	Kab. Klaten	0	61	1	78	56
11	Kab. Sukoharjo	0	57	0	68	51
12	Kab. Wonogiri	0	17	0	8	12
13	Kab. Karanganyar	0	8	0	12	10
14	Kab. Sragen	0	52	0	64	42
15	Kab. Grobogan	0	12	0	18	10
16	Kab. Blora	0	7	2	14	8
17	Kab. Rembang	0	16	0	22	17
18	Kab. Pati	0	51	4	62	47
19	Kab. Kudus	0	38	0	47	31
20	Kab. Jepara	0	37	0	48	34
21	Kab. Demak	0	36	1	36	24
22	Kab. Semarang	0	28	0	28	26
23	Kab. Temanggung	0	16	1	26	14
24	Kab. Kendal	0	49	4	59	32
25	Kab. Batang	0	5	1	7	14
26	Kab. Pekalongan	0	18	1	29	13
27	Kab. Pemalang	0	19	0	27	23
28	Kab. Tegal	0	11	1	18	16
29	Kab. Brebes	0	28	1	34	31
30	Kota Magelang	0	21	1	34	17
31	Kota Surakarta	1	187	4	155	102
32	Kota Salatiga	0	24	0	12	21
33	Kota Semarang	1	248	5	316	232
34	Kota Pekalongan	0	8	0	13	12
35	Kota Tegal	0	8	0	11	6
Provinsi Jawa Tengah		2	1.295	30	1.548	1.107

Sumber: Polda Jawa Tengah

Tabel 25. Jenis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

No	Kabupaten/Kota	Narkotika	Obat Keras
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab. Cilacap	27	3
2	Kab. Banyumas	57	13
3	Kab. Purbalingga	4	3
4	Kab. Banjarnegara	8	7
5	Kab. Kebumen	5	13
6	Kab. Purworejo	0	20
7	Kab. Wonosobo	5	4
8	Kab. Magelang	27	19
9	Kab. Boyolali	3	0
10	Kab. Klaten	12	0
11	Kab. Sukoharjo	15	12
12	Kab. Wonogiri	3	2
13	Kab. Karanganyar	8	5
14	Kab. Sragen	6	3
15	Kab. Grobogan	0	1
16	Kab. Blora	2	2
17	Kab. Rembang	0	8
18	Kab. Pati	10	9
19	Kab. Kudus	5	42
20	Kab. Jepara	8	0
21	Kab. Demak	6	1
22	Kab. Semarang	3	7
23	Kab. Temanggung	4	6
24	Kab. Kendal	7	35
25	Kab. Batang	5	66
26	Kab. Pekalongan	9	2
27	Kab. Pemalang	8	8
28	Kab. Tegal	12	1
29	Kab. Brebes	18	6
30	Kota Magelang	6	15
31	Kota Surakarta	91	0
32	Kota Salatiga	5	29
33	Kota Semarang	37	10
34	Kota Pekalongan	18	0
35	Kota Tegal	18	0
	Dit Narkoba	107	12
	Provinsi Jawa Tengah	559	364

Sumber: Polda Jawa Tengah

**Tabel 26. Jumlah Kasus 11 Jenis Tindak Pidana Pilihan
di Provinsi Jawa Tengah menurut Jam Kejadian Tahun 2010**

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah	06:00-08:59	09:00 - 11:59	12:00 - 14:59	15:00 - 17:59	18:00 - 20:59	21:00 - 23:59	00:00 - 01:59	02:00 - 03:59	04:00 - 05:59
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pembunuhan	79	0	13	11	4	6	36	6	3	0
2	Penganiayaan Berat	288	8	61	90	48	43	32	4	2	0
3	Pencurian dengan Pemberatan	2.387	12	131	346	677	412	512	201	87	9
4	Pencurian dengan kekerasan	280	2	9	16	36	46	62	68	39	2
5	Pencurian kendaraan bermotor	1.548	7	97	118	127	548	366	177	102	6
6	Kebakaran	408	2	6	21	25	120	133	66	31	4
7	Perjudian	435	0	21	38	13	78	122	91	69	3
8	Pemerasan/Ancam	121	2	18	44	22	16	18	1	0	0
9	Perkosaan	104	3	9	11	17	32	27	3	2	0
10	Narkotika	400	0	3	6	6	69	137	94	78	7
11	Kenakalan Remaja	14	0	4	8	2	0	0	0	0	0
Provinsi Jawa Tengah		6.064	36	372	709	977	1.370	1.445	711	413	31

Sumber: Polda Jawa Tengah

**Tabel 27. Sepuluh Jenis Tindak Pidana Terbesar
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010**

Peringkat	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Pencurian dengan pemberatan	2.387
2	Pencurian kendaraan bermotor	1.548
3	Penipuan	1.295
4	Penggelapan	1.127
5	Pencurian biasa	1.107
6	Penganiayaan ringan	473
7	Perjudian	435
8	Narkoba	400
9	Penganiayaan berat	288
10	Pencurian dengan kekerasan	280
Provinsi Jawa Tengah		9.340

Sumber: Polda Jawa Tengah

**Tabel 28. Tindak Kejahatan Menonjol (*Crime Index*)
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2010**

No	Kasus	2009		2010	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pencurian dengan pemberatan	2.750	8,87	2.387	18,31
2	Pencurian kendaraan bermotor	1.782	5,75	1.548	11,88
3	Pencurian dengan kekerasan	310	1,00	280	2,15
4	Penganiayaan berat	408	1,32	288	2,21
5	Kebakaran	491	1,58	408	3,13
6	Pembunuhan	69	0,22	79	0,61
7	Perkosaan	133	0,43	104	0,80
8	Kenakalan remaja	24	0,08	14	0,11
9	Uang palsu	46	0,15	31	0,24
10	Narkotika	542	1,75	400	3,07
11	Perjudian	718	2,31	435	3,34
12	Pemerasan dan pengancaman	400	1,29	121	0,93
Jumlah Tindak Pidana Menonjol		7.673	24,74	6.095	46,76
Total Jumlah Tindak Pidana		31.016	100,00	13.035	100,00

Sumber: Polda Jawa Tengah

Tabel 29. Pelaku Tindak Kejahatan menurut Kabupaten/Kota, Klasifikasi Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

No	Kabupaten/Kota	Dewasa		Anak-anak		Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kab. Cilacap	410	1	0	0	410	1	411
2	Kab. Banyumas	358	3	2	0	360	3	363
3	Kab. Purbalingga	289	2	0	0	289	2	291
4	Kab. Banjarnegara	194	1	0	0	194	1	195
5	Kab. Kebumen	351	2	0	0	351	2	353
6	Kab. Purworejo	261	2	0	0	261	2	263
7	Kab. Wonosobo	291	0	0	0	291	0	291
8	Kab. Magelang	471	4	0	0	471	4	475
9	Kab. Boyolali	291	1	0	0	291	1	292
10	Kab. Klaten	631	0	2	1	633	1	634
11	Kab. Sukoharjo	670	0	0	0	670	0	670
12	Kab. Wonogiri	252	1	0	0	252	1	253
13	Kab. Karanganyar	313	1	0	0	313	1	314
14	Kab. Sragen	342	0	0	0	342	0	342
15	Kab. Grobogan	410	2	0	0	410	2	412
16	Kab. Blora	234	0	0	0	234	0	234
17	Kab. Rembang	274	0	0	0	274	0	274
18	Kab. Pati	341	2	3	1	344	3	347
19	Kab. Kudus	519	1	0	0	519	1	520
20	Kab. Jepara	387	1	0	0	387	1	388
21	Kab. Demak	311	2	0	0	311	2	313
22	Kab. Semarang	483	17	3	0	486	17	503
23	Kab. Temanggung	349	1	0	0	349	1	350
24	Kab. Kendal	364	9	0	0	364	9	373
25	Kab. Batang	186	0	0	0	186	0	186
26	Kab. Pekalongan	241	2	0	0	241	2	243
27	Kab. Pemalang	287	4	1	0	288	4	292
28	Kab. Tegal	255	2	0	0	255	2	257
29	Kab. Brebes	248	5	3	0	251	5	256
30	Kota Magelang	152	2	0	0	152	2	154
31	Kota Surakarta	951	24	11	1	962	25	987
32	Kota Salatiga	228	4	0	0	228	4	232
33	Kota Semarang	1587	31	14	2	1601	33	1.634
34	Kota Pekalongan	212	0	0	0	212	0	212
35	Kota Tegal	241	1	0	0	241	1	242
Provinsi Jawa Tengah		13.384	128	39	5	13.423	133	13.556

Sumber: Polda Jawa Tengah

Tabel 30. Pelaku Tindak Kejahatan menurut Kabupaten/Kota, Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

No	Kabupaten/Kota	Warga Negara Indonesia (WNI)		Warga Negara Asing (WNA)		Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kab. Cilacap	410	1	0	0	410	1	411
2	Kab. Banyumas	360	3	0	0	360	3	363
3	Kab. Purbalingga	289	2	0	0	289	2	291
4	Kab. Banjarnegara	194	1	0	0	194	1	195
5	Kab. Kebumen	351	2	0	0	351	2	353
6	Kab. Purworejo	261	2	0	0	261	2	263
7	Kab. Wonosobo	291	0	0	0	291	0	291
8	Kab. Magelang	470	4	1	0	471	4	475
9	Kab. Boyolali	291	1	0	0	291	1	292
10	Kab. Klaten	633	1	0	0	633	1	634
11	Kab. Sukoharjo	670	0	0	0	670	0	670
12	Kab. Wonogiri	252	1	0	0	252	1	253
13	Kab. Karanganyar	313	1	0	0	313	1	314
14	Kab. Sragen	341	0	1	0	342	0	342
15	Kab. Grobogan	410	2	0	0	410	2	412
16	Kab. Blora	234	0	0	0	234	0	234
17	Kab. Rembang	274	0	0	0	274	0	274
18	Kab. Pati	344	3	0	0	344	3	347
19	Kab. Kudus	519	1	0	0	519	1	520
20	Kab. Jepara	387	1	0	0	387	1	388
21	Kab. Demak	311	2	0	0	311	2	313
22	Kab. Semarang	484	17	2	0	486	17	503
23	Kab. Temanggung	349	1	0	0	349	1	350
24	Kab. Kendal	364	9	0	0	364	9	373
25	Kab. Batang	186	0	0	0	186	0	186
26	Kab. Pekalongan	241	2	0	0	241	2	243
27	Kab. Pemalang	288	4	0	0	288	4	292
28	Kab. Tegal	255	2	0	0	255	2	257
29	Kab. Brebes	251	5	0	0	251	5	256
30	Kota Magelang	152	2	0	0	152	2	154
31	Kota Surakarta	950	25	12	0	962	25	987
32	Kota Salatiga	227	4	1	0	228	4	232
33	Kota Semarang	1.592	33	9	0	1601	33	1.634
34	Kota Pekalongan	210	0	2	0	212	0	212
35	Kota Tegal	241	1	0	0	241	1	242
Provinsi Jawa Tengah		13.395	133	28	0	13.423	133	13.556

Sumber: Polda Jawa Tengah

Tabel 31. Warga Negara Indonesia (WNI) Pelaku Tindak Kejahatan enurut Kabupaten/Kota, Klasifikasi Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

No	Kabupaten/Kota	Dewasa		Anak-anak		Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kab. Cilacap	410	1	0	0	410	1	411
2	Kab. Banyumas	358	3	2	0	360	3	363
3	Kab. Purbalingga	289	2	0	0	289	2	291
4	Kab. Banjarnegara	194	1	0	0	194	1	195
5	Kab. Kebumen	351	2	0	0	351	2	353
6	Kab. Purworejo	261	2	0	0	261	2	263
7	Kab. Wonosobo	291	0	0	0	291	0	291
8	Kab. Magelang	470	4	0	0	470	4	474
9	Kab. Boyolali	291	1	0	0	291	1	292
10	Kab. Klaten	631	0	2	1	633	1	634
11	Kab. Sukoharjo	670	0	0	0	670	0	670
12	Kab. Wonogiri	252	1	0	0	252	1	253
13	Kab. Karanganyar	313	1	0	0	313	1	314
14	Kab. Sragen	341	0	0	0	341	0	341
15	Kab. Grobogan	410	2	0	0	410	2	412
16	Kab. Blora	234	0	0	0	234	0	234
17	Kab. Rembang	274	0	0	0	274	0	274
18	Kab. Pati	341	2	3	1	344	3	347
19	Kab. Kudus	519	1	0	0	519	1	520
20	Kab. Jepara	387	1	0	0	387	1	388
21	Kab. Demak	311	2	0	0	311	2	313
22	Kab. Semarang	481	17	3	0	484	17	501
23	Kab. Temanggung	349	1	0	0	349	1	350
24	Kab. Kendal	364	9	0	0	364	9	373
25	Kab. Batang	186	0	0	0	186	0	186
26	Kab. Pekalongan	241	2	0	0	241	2	243
27	Kab. Pemasang	287	4	1	0	288	4	292
28	Kab. Tegal	255	2	0	0	255	2	257
29	Kab. Brebes	248	5	3	0	251	5	256
30	Kota Magelang	152	2	0	0	152	2	154
31	Kota Surakarta	939	24	11	1	950	25	975
32	Kota Salatiga	227	4	0	0	227	4	231
33	Kota Semarang	1.578	31	14	2	1.592	33	1.625
34	Kota Pekalongan	210	0	0	0	210	0	210
35	Kota Tegal	241	1	0	0	241	1	242
Provinsi Jawa Tengah		13.356	128	39	5	13.395	133	13.528

Sumber: Polda Jawa Tengah

Tabel 32. Warga Negara Asing (WNA) Pelaku Tindak Kejahatan menurut Kabupaten/Kota, Klasifikasi Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

No	Kabupaten/Kota	Dewasa		Anak-anak		Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kab. Cilacap	0	0	0	0	0	0	0
2	Kab. Banyumas	0	0	0	0	0	0	0
3	Kab. Purbalingga	0	0	0	0	0	0	0
4	Kab. Banjarnegara	0	0	0	0	0	0	0
5	Kab. Kebumen	0	0	0	0	0	0	0
6	Kab. Purworejo	0	0	0	0	0	0	0
7	Kab. Wonosobo	0	0	0	0	0	0	0
8	Kab. Magelang	1	0	0	0	1	0	1
9	Kab. Boyolali	0	0	0	0	0	0	0
10	Kab. Klaten	0	0	0	0	0	0	0
11	Kab. Sukoharjo	0	0	0	0	0	0	0
12	Kab. Wonogiri	0	0	0	0	0	0	0
13	Kab. Karanganyar	0	0	0	0	0	0	0
14	Kab. Sragen	1	0	0	0	1	0	1
15	Kab. Grobogan	0	0	0	0	0	0	0
16	Kab. Blora	0	0	0	0	0	0	0
17	Kab. Rembang	0	0	0	0	0	0	0
18	Kab. Pati	0	0	0	0	0	0	0
19	Kab. Kudus	0	0	0	0	0	0	0
20	Kab. Jepara	0	0	0	0	0	0	0
21	Kab. Demak	0	0	0	0	0	0	0
22	Kab. Semarang	2	0	0	0	2	0	2
23	Kab. Temanggung	0	0	0	0	0	0	0
24	Kab. Kendal	0	0	0	0	0	0	0
25	Kab. Batang	0	0	0	0	0	0	0
26	Kab. Pekalongan	0	0	0	0	0	0	0
27	Kab. Pemasang	0	0	0	0	0	0	0
28	Kab. Tegal	0	0	0	0	0	0	0
29	Kab. Brebes	0	0	0	0	0	0	0
30	Kota Magelang	0	0	0	0	0	0	0
31	Kota Surakarta	12	0	0	0	12	0	12
32	Kota Salatiga	1	0	0	0	1	0	1
33	Kota Semarang	9	0	0	0	9	0	9
34	Kota Pekalongan	2	0	0	0	2	0	2
35	Kota Tegal	0	0	0	0	0	0	0
Provinsi Jawa Tengah		28	0	0	0	28	0	28

Sumber: Polda Jawa Tengah

**Tabel 33. Kejadian Demonstrasi/Unjuk Rasa menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2010**

No	Kabupaten/Kota	2009		2010	
		Jumlah Kejadian	Jumlah Peserta	Jumlah Kejadian	Jumlah Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	14	649	8	349
2	Kab. Banyumas	39	2.258	31	1.658
3	Kab. Purbalingga	5	505	7	595
4	Kab. Banjarnegara	4	1.500	3	900
5	Kab. Kebumen	14	1.359	5	359
6	Kab. Purworejo	16	170	5	70
7	Kab. Wonosobo	8	250	6	210
8	Kab. Magelang	7	650	5	590
9	Kab. Boyolali	10	520	7	480
10	Kab. Klaten	16	750	6	50
11	Kab. Sukoharjo	21	790	20	990
12	Kab. Wonogiri	8	1.000	2	180
13	Kab. Karanganyar	5	800	1	70
14	Kab. Sragen	10	750	11	770
15	Kab. Grobogan	3	65	4	78
16	Kab. Blora	2	35	2	32
17	Kab. Rembang	7	165	2	62
18	Kab. Pati	24	800	12	320
19	Kab. Kudus	23	480	22	435
20	Kab. Jepara	9	200	12	267
21	Kab. Demak	12	200	11	170
22	Kab. Semarang	4	80	2	75
23	Kab. Temanggung	5	100	3	90
24	Kab. Kendal	11	250	5	250
25	Kab. Batang	10	650	4	550
26	Kab. Pekalongan	3	300	3	420
27	Kab. Pemalang	14	780	0	0
28	Kab. Tegal	6	1.200	6	970
29	Kab. Brebes	6	350	13	850
30	Kota Magelang	7	100	6	193
31	Kota Surakarta	36	5.440	27	6.640
32	Kota Salatiga	25	320	12	345
33	Kota Semarang	151	5.850	122	6.420
34	Kota Pekalongan	12	255	12	355
35	Kota Tegal	9	500	3	300
Provinsi Jawa Tengah		556	30.071	400	26.093

Sumber: Polda Jawa Tengah

Tabel 34. Banyaknya Hakim menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

No	Kabupaten/Kota	Hakim		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	9	1	10
2	Kab. Banyumas	9	7	16
3	Kab. Purbalingga	6	1	7
4	Kab. Banjarnegara	4	4	8
5	Kab. Kebumen	2	5	7
6	Kab. Purworejo	4	3	7
7	Kab. Wonosobo	4	5	9
8	Kab. Magelang	3	4	7
9	Kab. Boyolali	5	2	7
10	Kab. Klaten	7	2	9
11	Kab. Sukoharjo	5	3	8
12	Kab. Wonogiri	4	3	7
13	Kab. Karanganyar	5	4	9
14	Kab. Sragen	7	1	8
15	Kab. Grobogan	3	5	8
16	Kab. Blora	3	3	6
17	Kab. Rembang	3	4	7
18	Kab. Pati	6	2	8
19	Kab. Kudus	7	1	8
20	Kab. Jepara	7	1	8
21	Kab. Demak	5	3	8
22	Kab. Semarang	4	1	5
23	Kab. Temanggung	1	5	6
24	Kab. Kendal	5	2	7
25	Kab. Batang	3	5	8
26	Kab. Pekalongan	0	0	0
27	Kab. Pemalang	6	2	8
28	Kab. Tegal	4	3	7
29	Kab. Brebes	2	4	6
30	Kota Magelang	3	3	6
31	Kota Surakarta	11	0	11
32	Kota Salatiga	3	3	6
33	Kota Semarang	32	5	37
34	Kota Pekalongan	3	4	7
35	Kota Tegal	3	4	7
Provinsi Jawa Tengah		188	105	293

Sumber: Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Tengah

Tabel 35. Banyaknya Jaksa menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

No	Kabupaten/Kota	Hakim		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	9	2	11
2	Kab. Banyumas	7	2	9
3	Kab. Purbalingga	5	4	9
4	Kab. Banjarnegara	6	1	7
5	Kab. Kebumen	9	3	12
6	Kab. Purworejo	6	1	7
7	Kab. Wonosobo	4	0	4
8	Kab. Magelang	5	4	9
9	Kab. Boyolali	7	8	15
10	Kab. Klaten	6	7	13
11	Kab. Sukoharjo	12	4	16
12	Kab. Wonogiri	5	6	11
13	Kab. Karanganyar	6	5	11
14	Kab. Sragen	6	10	16
15	Kab. Grobogan	8	2	10
16	Kab. Blora	9	4	13
17	Kab. Rembang	7	2	9
18	Kab. Pati	12	3	15
19	Kab. Kudus	9	3	12
20	Kab. Jepara	8	4	12
21	Kab. Demak	5	5	10
22	Kab. Semarang	8	7	15
23	Kab. Temanggung	6	2	8
24	Kab. Kendal	8	2	10
25	Kab. Batang	4	3	7
26	Kab. Pekalongan	3	8	11
27	Kab. Pemalang	8	2	10
28	Kab. Tegal	8	2	10
29	Kab. Brebes	8	2	10
30	Kota Magelang	5	3	8
31	Kota Surakarta	20	10	30
32	Kota Salatiga	6	3	9
33	Kota Semarang	20	10	30
34	Kota Pekalongan	7	3	10
35	Kota Tegal	8	2	10
	Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	59	43	102

Sumber: Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. *Statistik Politik 2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. *Statistik Kriminal 2009*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. *Pedoman Pengisian Kuesioner Statistik Politik dan Keamanan 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. 2009. *Kilasannya Pemilu 2009 di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: KPU Provinsi Jawa Tengah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang nomor 22 tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu
- Undang-Undang nomor 10 tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
Provinsi Jawa Tengah
JI.Pahlawan No 6, Semarang
e-mail bps.3300@bps.go.id